

**PRINSIP-PRINSIP AKUNTANSI SYARIAH DALAM MENJAGA
AKUNTABILITAS LAPORAN KEUANGAN PADA
BNI SYARIAH CABANG MAKASSAR**

SKRIPSI

HALIDAYATI B

10573 05129 14



**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI & BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2018**

HALAMAN JUDUL

**PRINSIP-PRINSIP AKUNTANSI SYARIAH DALAM MENJAGA
AKUNTABILITAS LAPORAN KEUANGAN PADA
BNI SYARIAH CABANG MAKASSAR**

OLEH:

HALIDAYATI B

10573 05129 14

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Dalam Rangka Menyelesaikan Studi
Pada Program Studi Strata 1 Akuntansi**

**Program Studi Akuntansi
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2018**

MOTTO HIDUP

Mimpi bukanlah sesuatu yang hebat tetapi jadilah siapa saja yang kamu impikan,
semua orang layak mendapatkan kehidupan, baik itu besar atau kecil,
kaya atau miskin, kamu adalah kamu.

PERSEMBAHAN

Saya belum mampu memberikan kebahagiaan dan kebanggaan berupa materi,
namun dengan segala kerendahan hati, inilah hal kecil yang kuharapkan
bisa membahagiakan mereka.

Karya ini kudedikasikan kepada:

Ayahanda dan Ibunda tercinta, yang selama ini dengan penuh cinta, kasih sayang dan tanpa kenal lelah mendoakan, memberikan nasihat, semangat serta kerja keras yang tak ternilai harganya untuk mendukung setiap langkahku. Juga untuk adik-adikku tersayang. Dosen-dosenku, terutama pembimbingku Dr. Muryani Arsal, SE., MM. Ak. CA dan Samsul Rizal, SE., MM yang tak pernah lelah membimbing hingga selesainya karya ilmiah ini.

Terima kasih atas segala dukungan dan motivasi dari kalian semua.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat: Jl. Sultan Alauddin No.259 Telp. (0411) 860 132 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : "Prinsip-prinsip Akuntansi Syariah dalam Menjaga Akuntabilitas Laporan Keuangan pada BNI Syariah Cabang Makassar."

Nama : Halidayati B

No. Stambuk : 10573 05129 14

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

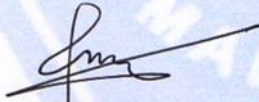
Telah mengikuti ujian skripsi pada hari Sabtu tanggal 6 Oktober 2018 bertempat diruangan 8.1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.


Makassar, 6 Oktober 2018

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Muryani Aرسال, SE.,MM.Ak.CA
NIDN. 0016116503

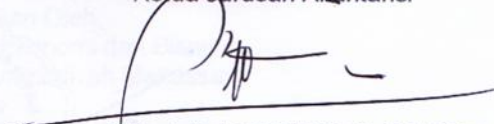

Samsul Rizal, SE.,MM
NIDN. 0907028401

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis

Ketua Jurusan Akuntansi


Ismail Rasulong, SE.,MM
NBM: 903078


Ismail Badollahi, SE.M.Si.Ak.CA.CSP
NBM: 107 3428



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Alamat: Jl. Sultan Alauddin No.259 Telp. (0411) 860 132 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi atas Nama **HALIDAYATI B**, NIM : **105730512914**, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor :0009/SK-Y/62201/091004/2018M. Tanggal 26 Muharram 1440H/ 6 Oktober 2018 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi** pada program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

26 Muharram 1440 H
Makassar, _____
6 Oktober 2018 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Dr. H. Rahman Rahim, SE., MM
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE., MM
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Dr. Agus Salim, HR, SE., MM
(WD I Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji : 1. Dr. Muryani Arsal, SE., MM.Ak.CA
2. Muchriana Muchran, SE.,M.Si.Ak.CA
3. Drs. H. Sultan Sarda, MM
4. Hj. Naidah, SE.,M.Si

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Disahkan Oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar



Ismail Rasulong, SE, MM
NIM : 903078



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Alamat: Jl. Sultan Alauddin No.259 Telp. (0411) 860 132 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Halidayati B
Stambuk : 105730512914
Program Studi : Akuntansi
Dengan Judul : "Prinsip-prinsip Akuntansi Syariah dalam Menjaga Akuntabilitas Laporan Keuangan pada BNI Syariah Cabang Makassar".

Dengan ini menyatakan bahwa:

Skripsi yang saya ajukan di depan tim penguji pada tanggal 6 Oktober 2018 adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

26 Muharram 1440 H
Makassar, _____
6 Oktober 2018 M

Yang membuat pernyataan,



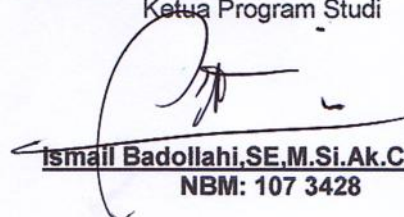
Halidayati B

Diketahui Oleh :



Ismail Rasulong, SE., MM
NBM: 903 078

Ketua Program Studi



Ismail Badollahi, SE., M.Si., Ak., CA., CSP
NBM: 107 3428

ABSTRAK

Halidayati B, 2018. **Prinsip-prinsip Akuntansi Syariah dalam Menjaga Akuntabilitas Laporan Keuangan pada BNI Syariah Cabang Makassar**, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing I Muryani Arsal dan Pembimbing II Samsul Rizal.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengetahui prinsip-prinsip akuntansi syariah dalam menjaga akuntabilitas laporan keuangan pada BNI Syariah Cabang Makassar. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah metode kualitatif deskriptif dimana pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan studi dokumen. Hasilnya menunjukkan prinsip-prinsip akuntansi syariah dalam menjaga akuntabilitas laporan keuangan sudah cukup baik, hal ini disebabkan karena adanya keterbukaan, kewajaran, dan prinsip-prinsip syariah dalam menjaga akuntabilitas laporan keuangannya sudah sesuai dan sesuai dengan PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah yang menyajikan laporan keuangan bertujuan umum untuk entitas syariah. Perusahaan hendaknya lebih menekankan untuk para pegawai agar mengetahui lebih banyak mengetahui tentang prinsip-prinsip syariah.

Kata Kunci : Tanggung Jawab, Keadilan, Kebenaran, Ketakwaan (Tauhid), Kejujuran dan Akuntabilitas Laporan Keuangan

ABSTRACT

Halidayati B, 2018. Principles of Sharia Accounting in Maintaining Accountability of Financial Reports at BNI Syariah Makassar Branch, Thesis of the Faculty of Economics and Business Accounting Department, Muhammadiyah University of Makassar. Supervised by Main Supervisor Muryani Arsal and Co Supervisor Samsul Rizal.

This study aims to find out the principles of Islamic accounting in maintaining the accountability of financial statements at BNI Syariah Makassar Branch. The type of research used in this research is descriptive qualitative method where data collection uses interview and document study techniques. The results show that the principles of sharia accounting in maintaining accountability of financial statements are good enough, this is due to the openness, fairness and principles of sharia in maintaining the accountability of the financial statements are in accordance with and in accordance with PSAK 101 concerning the presentation of sharia financial statements that report general purpose finance for sharia entities. The company should put more emphasis on employees to know more about sharia principles.

Keywords : responsibility, justice, truthness, piety (monotheism), fairness and accountability of financial reports

KATA PENGANTAR



Assalamu' Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi Penelitian yang berjudul **“Prinsip-Prinsip Akuntansi Syariah dalam Menjaga Akuntabilitas Laporan Keuangan pada BNI Syariah Cabang Makassar”**, tepat pada waktunya walaupun dengan berbagai rintangan dan hambatan. Salam dan shalawat tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabat dan orang-orang yang tetap istiqamah di jalan-Nya.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan Skripsi Penelitian ini banyak tantangan yang dihadapi, namun berkat kesabaran dan ketekunan serta bantuan rekan-rekan yang terlibat dalam menyelesaikan Skripsi Penelitian ini, hambatan dan tantangan dapat diatasi dengan baik dalam bentuk yang sederhana.

Menyadari bahwa Skripsi penelitian ini masih jauh dari sempurna, sebagaimana pepatah yang mengatakan bahwa tak ada gading yang tak retak, begitu juga dengan manusia yang tak luput dari kekhilafan/kesalahan. Sehubungan dengan itu dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tua saya

yaitu Ayahanda **Bakri** dan Ibunda **Nasriati** yang senantiasa mendukung sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Selain itu penulis banyak memperoleh bantuan dan dorongan moril maupun bimbingan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka sudah sepantasnyalah apabila pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih yang tulus kepada :

1. Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya.
2. Dr.H.Abd Rahman Rahim, SE.,MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Ismail Rasulong, SE.,MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Ismail Badollahi, SE,M.Si.Ak.CA.CSP selaku Ketua Jurusan Akuntansi.
5. Ibu Dr. Muryani Aرسال, SE.,MM.Ak.CA selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Samsul Rizal, SE.,MM selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, dan saran yang sangat berguna dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Seluruh Staff, Karyawan dan Dosen Fakultas Ekonomi UNISMUH yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.
7. Seluruh Pimpinan, Staf dan Karyawan BNI Syariah cabang Makassar yang telah memberikan izin, kesempatan, bantuan, dan arahan kepada penulis selama pengumpulan data dalam penelitian skripsi ini.
8. Kedua orang tua, ayahanda dan Ibunda yang selalu memberikan kasih sayang, do'a, serta dukungannya. Juga kepada saudara-saudaraku yang selalu membantu dan memberikan semangat selama ini.

9. Sahabat yang telah banyak memberikan bantuan, semangat, dukungan serta selalu memberi motivasi Fitra, Ani, Yuyu, Dhia, Ningsih, Dija, dan Rina, serta teman-teman seangkatan di Akuntansi 12 atas kebersamaannya selama ini.
10. Sahabat yang menemani dalam suka dan duka, mengingatkan untuk semangat meraih dunia dan akhirat yaitu Cita, Kiki, Titin, Rahma, dan Ria.
11. Segala pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu (BTS).

Menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis masih mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun guna perbaikan skripsi ini.

Billahi fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khairat, Wassalamualaikum WR, WR.

Makassar, 6 Oktober 2018

Halidayati B

105730512914

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN.....	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Pengertian Bank	6
B. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional	7
C. Fungsi dan Peranan Bank Syariah.....	10
D. Pengertian Akuntansi Syariah	11
E. Prinsip dalam Akuntansi Syariah.....	15
F. Pengertian Akuntabilitas	20
G. Prinsip-Prinsip Akuntabilitas.....	27
H. Tipe Akuntabilitas.....	28
I. Tinjauan Empiris	33
J. Kerangka Pikir.....	38

BAB III METODE PENELITIAN.....	39
A. Jenis Penelitian.....	39
B. Fokus Penelitian	39
C. Pemilihan Lokasi dan Situs Penelitian.....	39
D. Sumber Data.....	40
E. Pengumpulan Data	40
F. Instrumen Penelitian	40
G. Teknik Analisis	41
BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	43
A. Sejarah BNI Syariah.....	43
B. Visi dan Misi BNI Syariah.....	45
C. Tata Nilai dan Budaya Kerja BNI Syariah.....	45
D. Susunan Organisasi BNI Syariah	46
E. Struktur Organisasi BNI Syariah.....	47
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	49
A. Hasil Penelitian	49
B. Pembahasan Hasil Penelitian	59
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA.....	68
LAMPIRAN.....	71

DAFTAR TABEL

Nomor Judul	Halaman
Tabel 2.1	Perbedaan Bank Syariah dan Konvensional..... 8
Tabel 2.2	Perbedaan antara Bunga dan Hasil..... 9
Tabel 2.3	Tinjauan Empiris..... 36

DAFTAR GAMBAR

Nomor Judul	Halaman
Gambar 2.1	Kerangka Pikir 38
Gambar 4.1	Struktur Organisasi..... 48

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran :

1. Draft wawancara
2. Dokumentasi
3. Surat permohonan penelitian
4. SK. Selesai penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan syariah merupakan sebuah lembaga perantara yang mempunyai dua fungsi dan peranan yaitu untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat (Arsal et al., : 2014). Gagasan adanya lembaga perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariat Islam berkaitan erat dengan gagasan terbentuknya suatu sistem ekonomi Islam. Perbankan syariah telah banyak mencatatkan kemajuan dan pencapaian, yang ditunjukkan dengan meningkatkan aset perbankan syariah per November 2017 mencapai sekitar Rp411,98 triliun dengan pangsa pasar sebesar 5,60% (OJK : 2018). Menurut Prayuningrum dan Hasib (2017) bank syariah merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki surplus dana untuk kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana dalam berbagai bentuk pembiayaan yang semuanya dilakukan dengan berdasar prinsip syariah yang berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadits.

Perbankan syariah memperkenalkan suatu sistem yang tidak hanya menguntungkan bank akan tetapi juga peduli dengan kesejahteraan nasabah, yaitu transaksi berbasis *profit and lost sharing* atau lebih dikenal di Indonesia dengan sistem bagi hasil, yang selanjutnya tereduksi menjadi sistem *revenue sharing* dan berusaha untuk selalu meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanannya guna menarik nasabah baru dan menjaga loyalitas nasabah lama (Imama : 2014).

Perkembangan perbankan syariah saat ini menunjukkan trend positif tidak hanya pasarnya yang semakin besar tetapi keluarnya berbagai produk unggulan juga diminati banyak masyarakat. Sistem bagi hasil menekankan bahwa dalam setiap transaksi, kemungkinan untung dan rugi selalu ada tetapi konsep yang jauh dari riba dan sesuai syariat Islam membuat produk perbankan syariah menjadi pilihan umat muslim di Indonesia yang berniat menjalankan agama Islam secara kaffah. Sistem perbankan syariah juga dapat dimanfaatkan oleh semua kalangan, bukan hanya yang beragama Islam, dan terus tumbuh dengan signifikan dari tahun ke tahun.

Menurut Al-Quran dan Hadist memberikan petunjuk apa dan bagaimana yang diperbolehkan dalam aktivitas ekonomi seperti larangan mengambil dan memungut riba (bunga) karena haram. Oleh karena itu bagi muslim dapat menggunakan jasa perbankan syariah untuk menghindari dari keraguan adanya riba (Arsal et al., : 2014).

Dalam rangka menghindari pembayaran dan penerimaan riba atau bunga, maka dalam melaksanakan kegiatan pembiayaan (*financing*), perbankan syariah menempuh mekanisme bagi hasil (*profit and loss sharing investment*) sebagai pemenuhan kebutuhan permodalan (*equity financing*) dan investasi berdasarkan imbalan (*fee based investment*) melalui mekanisme jual beli sebagai pemenuhan kebutuhan pembiayaan (*debt financing*). Bentuk *equity financing* ini terdiri dari dua macam kontrak yaitu, musyarakah (*joint venture profit sharing*), dan *mudharabah* (*trustee profit sharing*). Sedangkan *debt financing* dilakukan dengan menggunakan teknik jual beli yang biasa dilakukan dengan cara segera (*cash*) atau

dengan tangguh. Adapun yang termasuk dalam jenis ini adalah *murabahah*, *ba'i bi saman 'ajil*, *ba'i salam*, *ba'i istisna'i*, *ijarah* atau sewa (Susila : 2016).

Salah satu fungsi dari bank syariah sebagai lembaga intermediasi adalah menyalurkan dana yang telah dihimpun kepada masyarakat dalam berbagai bentuk pembiayaan dan dapat dilakukan dengan berbagai bentuk akad sesuai dengan kebutuhan nasabah. Kegiatan pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah disamping untuk meningkatkan profit bank syariah dan meningkatkan bagi hasil nasabah yang menyimpan dananya juga sangat penting untuk menghindari adanya dana yang menganggur (*idle fund*).

Pengawasan atas pelaksanaan prinsip prinsip syariah pada lembaga keuangan syariah menjadi sesuatu yang sangat urgen dan utama untuk dilaksanakan dimana hal itu merupakan *core* atau inti dari operasional lembaga keuangan syariah. Pengawasan juga diperlukan untuk menemukan praktik praktik *fraud* atau kecurangan yang dilakukan oleh oknum oknum lembaga keuangan syariah demi keuntungan semata dan untuk melindungi nasabah atau para pihak yang bertransaksi atau melakukan transaksi dengan lembaga keuangan syariah.

Prinsip akuntansi syariah yang mengatur mengenai akuntabilitas laporan yang dibuat oleh perbankan syariah dapat dilihat dalam beberapa PSAK. Menurut PSAK 101 penyajian laporan keuangan syariah menetapkan dasar penyajian laporan keuangan yang bertujuan umum untuk entitas syariah. Pernyataan ini mengatur persyaratan penyajian laporan keuangan, struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimal isi laporan keuangan atas transaksi syariah.

Akuntabilitas dalam perspektif Islam memiliki cakupan yang lebih luas dibanding akuntabilitas konvensional. Berdasarkan kondisi tersebut maka penulis bermaksud untuk meneliti prinsip-prinsip akuntansi syariah dalam menjaga akuntabilitas laporan keuangan pada BNI Syariah. Penelitian ini dilakukan di BNI Syariah karena salah satu bank syariah terbesar di Indonesia dan merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang operasinya disesuaikan dengan prinsip agama Islam. BNI Syariah salah satu cirinya yaitu dengan sistem bagi hasil (*Profit Sharing*) yang ditentukan di awal perjanjian. Berbeda dengan bunga persentasi bagi hasil ini belum tentu sama tiap bulannya. Untuk membatasi fokus penelitian ini maka prinsip akuntansi syariah hanya akan dilakukan di BNI Syariah Cabang Makassar.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang yang dikemukakan maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah prinsip-prinsip akuntansi syariah dalam menjaga akuntabilitas laporan keuangan pada BNI Syariah Cabang Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui prinsip-prinsip akuntansi syariah dalam menjaga akuntabilitas laporan keuangan pada BNI Syariah Cabang Makassar.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis, sekurang-kurangnya dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia akademik.

2. Manfaat Praktis

Menambah wawasan bagi penulis, sebagai masukan yang membangun guna meningkatkan kualitas pendidikan yang ada, dan sebagai masukan Instansi perusahaan dalam hal menjaga akuntabilitas laporan keuangan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Bank

Bank merupakan lembaga keuangan yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali ke masyarakat guna memenuhi kebutuhan dana bagi pihak yang membutuhkan, juga berperan sebagai lembaga intermediasi/perantara bagi masyarakat yang kelebihan dana dan masyarakat yang kekurangan dana untuk memenuhi kebutuhannya baik untuk kegiatan produktif maupun konsumtif. Menurut Undang-undang No. 10 tahun 1998 jenis bank berdasarkan kegiatan usaha terdiri dari bank umum dan bank perkreditan rakyat. Pengertian bank umum menurut Wiroso (2005: 34) adalah bank yang melaksanakan kegiatan secara konvensional dan atau berlandaskan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa jenis bank berdasarkan kegiatan usahanya dapat dibedakan menjadi 2 yaitu bank konvensional dan bank syariah. Pengertian bank syariah menurut Muhammad (2005: 12) adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Atau dengan kata lain, Islam adalah lembaga yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariah (Arsal et al., : 2014). Dari pengertian diatas, bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah

adalah bank yang menggunakan hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al Hadits dalam melaksanakan kegiatan perbankannya. Melalui produk-produk yang dihasilkan oleh bank Islam atau bank syariah dalam produk pengumpulan dana tersebut dapat dioperasikan sesuai dengan ketentuan ajaran Islam. Perbedaan utama antara kegiatan bank berdasarkan prinsip syariah dengan bank konvensional pada dasarnya terletak pada sistem pemberian imbalan atau jasa dan tidak ada pengenaan unsur bunga dalam setiap aktivitas operasinya.

B. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah secara umum diuraikan dalam tabel 2.1. Berdasarkan tabel tersebut, secara garis besarnya dapat disimpulkan bahwa perbedaan-perbedaan bank konvensional dan bank syariah yaitu dimana bank syariah selain sebagai intermediasi juga investor sosial, antiriba, tidak bebas nilai, bagi hasil untuk kepentingan publik, tujuannya untuk sosial ekonomi Islam dalam bank pembangunan, universal atau multipurpose, bank syariah lebih berhati-hati karena berpartisipasi dalam resiko, berhubungan erat sebagai mitra usaha, dilandasi oleh Badan Arbitrase Syariah Nasional, risikonya dihadapi bersama antara bank dan nasabah dengan prinsip keadilan dan kejujuran serta tidak mungkin terjadi *negative spread*, diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah Nasional dan berinvestasi dengan halal.

Perbedaan yang dapat disimpulkan dalam bank syariah bahwa mekanisme dan usaha objek usahanya antiriba, prinsip dasar operasinya

tidak bebas nilai juga menerapkan bagi hasil, jual beli, dan sewa, serta hubungannya dengan nasabah erat sebagai mitra usaha.

TABEL 2.1 Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah

	Bank Konvensional	Bank Syariah
Fungsi dan kegiatan bank	Intermediasi, jasa keuangan	Intermediasi, manager investasi, investor sosial, jasa keuangan
Mekanisme dan Objek Usaha	Tidak antiriba dan antimaysir	Antiriba dan antimaysir
Prinsip dasar Operasi	1. Bebas nilai (prinsip materialis) 2. Uang sebagai komoditi 3. Bunga	1. Tidak bebas nilai (prinsip syariah Islam) 2. Uang sebagai alat tukar dan komoditi 3. Bagi hasil, jual beli, sewa
Prioritas Pelayanan	Kepentingan pribadi	Kepentingan public
Orientasi	Keuntungan	Tujuan sosial-ekonomi Islam, Keuntungan
Bentuk	Bank Komersial	Bank komersial, bank pembangunan, bank universal, atau multipurpose
Evaluasi Nasabah	Kepastian pengembalian pokok dan bunga (<i>creditworthiness</i> dan <i>collateral</i>)	Lebih hati-hati karena partisipasi dalam resiko
Hubungan Nasabah	Terbatas debitor-kreditor	Erat sebagai mitra usaha
Sumber likuiditas jangka pendek	Pasar Uang, Bank Sentral	Pasar Uang Syariah, Bank Sentral
Pinjaman yang diberikan	Komersial dan nonkomersial, berorientasi laba	Komersial dan nonkomersial, berorientasi laba dan nirlaba
Lembaga penyelesaian sengketa	Pengadilan, Arbitrase	Pengadilan, Badan Arbitrase Syariah Nasional
Risiko Usaha	1. Risiko bank tidak terkait langsung dengan debitor, risiko debitor tidak terkait langsung dengan bank 2. Kemungkinan terjadi <i>negative spread</i>	1. Dihadapi bersama antara bank dan nasabah dengan prinsip keadilan dan kejujuran 2. Tidak mungkin terjadi <i>negative spread</i>
Struktur Organisasi Pengawas	Dewan komisaris	Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Dewan Syariah Nasional
Investasi	Halal atau haram	Halal

Sumber : Ascarya (2006: 33)

Perbedaan antara bunga dan bagi hasil dapat dilihat pada tabel 2.2 :

TABEL 2.2 Perbedaan Antara Bunga dan Bagi Hasil

Bunga	Bagi Hasil
1. Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu menghasilkan keuntungan.	1. Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil disepakati pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.
2. Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah dana/modal yang dipinjamkan.	2. Besarnya rasio bagi hasil didasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.
3. Bunga dapat mengambang/variabel, dan besarnya naik turun sesuai dengan naik turunnya bunga patikan atau kondisi ekonomi.	3. Rasio bagi hasil tidak berubah selama akad masih berlaku kecuali diubah atas kesepakatan bersama.
4. Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah usaha yang dijalankan oleh peminjam untung atau rugi.	4. Bagi hasil bergantung pada keuntungan usaha yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama.
5. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun keuntungan naik berlipat ganda.	5. Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan keuntungan.
6. Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama.	6. Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil.

Sumber : Ascarya (2006: 26)

Berdasarkan tabel 2.2, perbedaan utama bunga dan bagi hasil terletak pada penentuan rasio/nisbah bagi hasil disepakati pada waktu akad, besarnya rasio bagi hasil didasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh, rasio bagi hasil tidak berubah selama akad masih berlaku, bagi hasil bergantung pada keuntungan, jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan keuntungan, dan tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil.

C. Fungsi dan Peranan Bank Syariah

Dalam fungsinya sebagai penerima amanah bank syariah melakukan kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito dengan prinsip *wadiah* dan *mudharabah*. Sebagai pengelola investasi bank syariah melaksanakan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan baik dengan menggunakan prinsip jual beli, bagi hasil dan sewa. Sebagai penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, bank syariah melakukan kegiatan jasa seperti *wakalah*, *kafalah*, *qard*, *hiwalah*, *rahn* dan lainnya. Sebagai pelaksana kegiatan sosial, bank syariah melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kebajikan bentuk *qardhul hasan* dan zakat, infak dan *shadaqah*.

Fungsi dan peran bank syariah yang diantaranya tercantum dalam pembukuan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*), sebagai berikut:

1. Manajer investasi, bank syariah dapat mengelola investasi dana nasabah.
2. Investor, bank syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dan nasabah yang dipercayakan kepadanya.
3. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, bank syariah dapat melakukan kegiatan-kegiatan jasa-jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya.
4. Pelaksanaan kegiatan sosial, sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan syariah, bank Islam juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola (menghimpun, mengadministrasikan, mendistribusikan) zakat serta dana-dana sosial lainnya.

Adanya bank syariah diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan-pembiayaan yang diberikan. Melalui pembiayaan ini bank syariah dapat menjadi mitra dengan nasabah, sehingga hubungan bank syariah dengan nasabah tidak lagi sebagai kreditur dan debitur tetapi menjadi hubungan kemitraan. Secara khusus peranan bank syariah dijelaskan oleh Muhammad (2005:39), sebagai berikut :

1. Menjadi perekat nasionalisme baru
2. Memberdayakan ekonomi umat dan beroperasi secara transparan
3. Memberikan return yang lebih baik
4. Mendorong penurunan spekulasi di pasar keuangan
5. Mendorong pemerataan pendapatan
6. Peningkatan efisiensi mobilisasi dana
7. Uswah hasanah implementasi moral dalam penyelenggaraan usaha bank
8. Salah satu sebab terjadinya krisis adalah adanya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)

D. Pengertian Akuntansi Syariah

Akuntansi merupakan bagian dari informasi yang tidak dapat dipisahkan dari suatu gugusan utama manajemen dalam mencapai tujuan terutama dalam pengawasan dan perencanaan, dalam fungsi pengawasan tugas akuntansi sangat strategis yaitu : sebagai alat pembanding dan rencana. Adapun maksud dari pembanding disini yaitu dimaksudkan untuk mengetahui penyimpangan (murabahah) yang terjadi sehingga manajemen

dapat dengan mudah melakukan perbaikan, penilaian atau koreksi secara lebih dini.

Pengertian akuntansi menurut APB (*Accounting Principle Board*) *Statement* No. 4 adalah suatu kegiatan jasa, fungsinya adalah memberikan informasi kuantitatif, umumnya dalam ukuran uang, mengenai suatu badan ekonomi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam memilih diantara beberapa alternatif.

Sedangkan pengertian akuntansi syariah menurut Muhammad (2001:19) akuntansi yang dikembangkan dan bukan hanya dengan tambal sulam terhadap akuntansi konvensional, akan tetapi merupakan pengembangan filosofis terhadap nilai-nilai Al Qur'an yang dikeluarkan dalam pemikiran teoritis dan teknis akuntansi. Menurut Triyuwono (2002:34) akuntansi syariah terikat pada ketentuan syariah sehingga laporan keuangan harus sedapat mungkin memenuhi ketentuan-ketentuan syariah tersebut, oleh karena itu akuntansi syariah dapat mengikat para individu pada suatu jaringan etika dalam rangka menciptakan realitas sosial menjalankan bisnis yang mengandung nilai tauhid kepada ketentuan-ketentuan Allah SWT, yang merupakan rangkaian dari tujuan syariah yaitu mencapai masalah. Dengan demikian akuntansi syariah dapat diartikan suatu informasi keuangan yang dipakai suatu perusahaan untuk pengambilan suatu keputusan yang berdasarkan pada syariat Islam.

Jika kita cermati surat Al-Baqarah ayat 282, Allah SWT memerintahkan untuk melakukan penulisan secara benar atas segala transaksi yang pernah terjadi selama melakukan muamalah. Sehubungan dengan ini, beberapa definisi akuntansi dapat disajikan, diantaranya:

Littleton mendefinisikan, tujuan utama dari akuntansi adalah untuk melaksanakan perhitungan periodik antara biaya (usaha) dari hasil (prestasi). Konsep ini merupakan inti dari teori akuntansi dan merupakan ukuran yang dijadikan sebagai rujukan dalam mempelajari akuntansi .

APB (*Accounting Principle Board*) *Statement* No. 4 akuntansi adalah suatu kegiatan jasa. Fungsinya adalah memberikan informasi kuantitatif, umumnya dalam ukuran uang mengenai suatu badan ekonomi yang dimaksud untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi, yang digunakan dalam memilih beberapa alternatif”

AICPA (*American Institute of Certified Public Accountant*) mendefinisikan akuntansi adalah seri pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dan dalam ukuran moneter, transaksi dan kejadian umumnya bersifat keuangan dan termasuk menafsirkan hasilnya.

Pengertian akuntansi syariah jika ditinjau secara etimologi, kata akuntansi berasal dari bahasa Inggris, *accounting*, dalam bahasa Arabnya disebut “Muhasabah” yang berasal dari kata hasabah, hasibah, muhasabah atau wazan yang lain adalah hasabah, hisabah, artinya menimbang, memperhitungkan mengkalkulasikan, mendata atau menghisab, yakni menghitung dengan seksama atau teliti yang harus dicatat dalam pembukuan tertentu.

Menurut Zaid (2010:42) yang diterjemahkan oleh Antonio dan Harahap mendefinisikan akuntansi sebagai muhasabah yaitu suatu aktifitas yang teratur berkaitan dengan pencatatan transaksi-transaksi, tindakan-tindakan, keputusan-keputusan yang sesuai dengan syari’at dan jumlah-

jumlahnya, di dalam catatan-catatan yang representatif, serta berkaitan dengan pengukuran dengan hasil-hasil keuangan yang berimplikasi pada transaksi-transaksi, tindakan-tindakan, keputusan-keputusan tersebut untuk membentuk pengambilan keputusan yang tepat. Berdasarkan definisi ini dapat dibatasi karakteristik musahabah sebagai berikut :

1. Aktifitas yang teratur.
2. Pencatatan :
 - a. Transaksi-transaksi, tindakan-tindakan, keputusan-keputusan yang sesuai dengan hukum.
 - b. Jumlah-jumlahnya.
 - c. Didalam catatan yang representatif.
3. Pengukuran hasil-hasil keuangan.
4. Membantu pengambilan keputusan yang tepat.

Menurut Harahap (2003:56) akuntansi Islam atau akuntansi syariah pada hakekatnya adalah penggunaan akuntansi dalam menjalankan syariah Islam. Akuntansi syariah ada dua versi, akuntansi syariah yang secara nyata telah diterapkan pada era dimana masyarakat menggunakan sistem nilai Islami khususnya pada era Nabi SAW, Khulaurasyiddin, dan pemerintah Islam lainnya. Kedua akuntansi syariah yang saat ini muncul dalam era dimana kegiatan ekonomi dan sosial dikuasai (*dihegemony*) oleh sistem nilai kapitalis yang berbeda dari sistem nilai Islam. Kedua jenis akuntansi itu bisa berbeda dalam merespon situasi masyarakat yang ada pada masanya.

E. Prinsip dalam Akuntansi Syariah

Nilai pertanggungjawaban, keadilan dan kebenaran selalu melekat dalam sistem akuntansi syariah. Ketiga nilai tersebut tentu saja telah menjadi prinsip dasar yang universal dalam operasional akuntansi syariah. Berikut tiga makna yang terkandung dalam tiga prinsip yang terdapat dalam surah Al-Baqarah:282.

Surat Al-Baqarah Ayat 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبَ
بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ
وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ
الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِكِ
وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ
فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ
إِحْدَاهُمَا الْآخَرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ
تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشُّهَادَةِ
وَأُدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ
عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۖ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا
شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.

Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

1. Prinsip Pertanggungjawaban

Prinsip Pertanggungjawaban (*accountability*) merupakan konsep yang tidak asing lagi dikalangan masyarakat muslim.

Pertanggungjawaban selalu berkaitan dengan konsep amanah. Bagi kaum muslim, persoalan amanah merupakan hasil transaksi manusia dengan sang Khaliq mulai dari alam kandungan. Manusia diciptakan Allah SWT sebagai khalifah dimuka bumi. Manusia dibebani amanah oleh Allah SWT untuk menjalankan fungsi-fungsi kekhalifahannya. Inti kekhalifahan adalah menjalankan atau menunaikan amanah.

Banyak ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang proses pertanggungjawaban manusia sebagai pelaku amanah Allah SWT dimuka bumi. Implikasi dalam bisnis dan akuntansi adalah bahwa individu yang terlibat dalam praktik bisnis harus selalu melakukan pertanggungjawaban apa yang telah diamanahkan dan diperbuat kepada pihak-pihak yang terkait. Wujud pertanggungjawabannya biasanya dalam bentuk laporan akuntansi.

2. Prinsip Keadilan

Jika ditafsirkan lebih lanjut, ayat 282 surah Al-Baqarah mengandung prinsip keadilan dalam melakukan transaksi. Prinsip keadilan ini tidak saja merupakan nilai yang sangat penting dalam etika kehidupan sosial dan bisnis, tetapi juga merupakan nilai yang secara inheren melekat dalam fitrah manusia. Hal ini berarti bahwa manusia itu pada dasarnya memiliki kapasitas dan energi untuk berbuat adil dalam setiap aspek kehidupannya.

Dalam konteks akuntansi, menegaskan kata adil dalam ayat 282 surah Al-Baqarah, secara sederhana dapat berarti bahwa setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan dicatat dengan benar. Misalnya, jika nilai transaksi adalah sebesar Rp. 100 juta maka

akuntansi (perusahaan akan mencatatnya dengan jumlah yang sama; dengan kata lain, tidak ada *window dressing* dalam perusahaan).

Dengan demikian, kata keadilan dalam konteks aplikasi akuntansi mengandung dua pengertian, yaitu : pertama adalah berkaitan dengan praktik moral, yaitu kejujuran, yang merupakan faktor yang sangat dominan. Tanpa kejujuran ini, informasi akuntansi yang disajikan akan menyesatkan dan sangat merugikan masyarakat. Kedua, kata adil bersifat lebih fundamental (dan tetap berpihak pada nilai-nilai etika/syariah dan moral). Pengertian kedua inilah yang lebih merupakan sebagai pendorong untuk melakukan upaya-upaya dekonstruksi terhadap bangun akuntansi modern menuju pada bangun akuntansi (alternatif) yang lebih baik.

3. Prinsip Kebenaran

Prinsip kebenaran ini sebenarnya tidak dapat dilepaskan dengan prinsip keadilan. Sebagai contoh, misalnya dalam akuntansi kita akan selalu dihadapkan dalam masalah pengakuan, pengukuran dan pelaporan. Aktivitas ini akan dapat dilakukan dengan baik apabila dilandaskan pada nilai kebenaran. Kebenaran ini akan dapat menciptakan keadilan dalam mengakui, mengukur dan melaporkan transaksi-transaksi ekonomi. Kebenaran dalam Al-Qur'an tidak diperbolehkan untuk dicampur adukkan dalam kebatilan. Al-Qur'an telah menggariskan bahwa ukuran, alat atau instrumen untuk menetapkan kebenaran tidaklah berdasarkan nafsu.

4. Prinsip Ketakwaan (Tauhid)

Seorang muslim ketika membeli dan menjual, menyewakan dan memperkerjakan, melakukan penukaran dengan yang lainnya dalam harta atau berbagai kemanfaatan, ia selalu tunduk kepada aturan Allah dalam muamalahnya. Allah meletakkan prinsip tauhid (ketakwaan) sebagai prinsip utama dalam muamalah. Oleh karena itu, segala aktivitas dalam muamalah harus senantiasa mengarahkan para pelakunya dalam rangka untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Inilah bagian dari hikmah mengapa dalam konsep muamalah yang islami diharamkan beberapa hal berikut.

- a. Diharamkan muamalah yang mengandung maksiat kepada Allah, sehingga yang dihasilkan dari perbuatan maksiat pun diharamkan.
- b. Diharamkan memperjualbelikan barang-barang yang diharamkan, baik barang yang haram dikonsumsi (seperti: khamar dan babi) maupun haram untuk dibuat dan diperlakukan secara tidak proporsional (misalnya: patung-patung).
- c. Diharamkan berbuat kecurangan, penipuan, dan kebohongan dalam muamalah.
- d. Diharamkan mempertuhankan harta. Korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah buah dari sikap manusia yang mempertuhankan harta dan jabatan.

5. Prinsip Kejujuran

Al-Qaradhawi mengatakan bahwa diantara nilai transaksi yang terpenting dalam bisnis adalah al-amanah "kejujuran". Ia merupakan

puncak moralitas iman dan karakteristik yang paling menonjol dari orang-orang yang beriman.

Prinsip amanah dalam organisasi perusahaan dapat terwujud dalam nilai-nilai akuntabilitas (pertanggungjawaban) perusahaan melalui penyajian laporan keuangan tiap periode. Dalam hal ini perusahaan harus memberi kesempatan yang besar bagi nasabah untuk mengakses laporan keuangan perusahaan.

F. Pengertian Akuntabilitas

Fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di Indonesia adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun daerah. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Mulawarman (2011) mengungkapkan akuntabilitas *abd Allah* merupakan bentuk pertanggungjawaban berhubungan ketundukan terhadap ketetapan syariah. Akuntabilitas *abd Allah* dibagi menjadi dua, yaitu *abd Allah* primer dan sekunder. Akuntabilitas *abd Allah* primer merupakan kepatuhan perusahaan melakukan penyucian segala sesuatu yang diterima, diproses maupun didistribusikan secara halal. Ketetapan halal baik halal *zaty* (bentuknya), *makany* (tempat pelaksanaannya) dan halal *hukmy* (proses mendapatkan dan menggunakannya) dari sisi sosial dan lingkungan. Akuntabilitas *abd Allah* sekunder merupakan kepatuhan

perusahaan melakukan penyucian yang diterima, diproses dan didistribusikan yang bebas *riba* ekonomi menjadi *bai'*, maupun pembebasan aktivitas *riba* sosial-lingkungan menjadi *shadaqah*. Akuntabilitas *abd Allah* baik menetapkan kriteria halal dan bebas *riba* di atas sifatnya materi. Akuntabilitas *abd Allah juga* memiliki sifat non materi, yaitu *thoyib*, kriteria *thoyib* lebih bersifat spiritual batin (Mulawarman, 2011). Lebih lanjut Mulawarman (2011) menyontohkan akuntabilitas kreativitas (mental dan material) dibagi menjadi output kreativitas primer dan output kreativitas sekunder. Pencatatan bentuk kreativitas primer secara finansial yaitu reduksi *riba* ekonomi berbentuk *bai'*, dan sosial/lingkungan yaitu reduksi *riba* sosial berbentuk *Profit Loss Sharing System*. Serta menjalankan aktivitas perusahaan dalam penyuluhan dan kursus maupun peningkatan kemampuan masyarakat sekitar dalam memahami kesadaran bersama menjaga keseimbangan ekologis dan menjaga keserasian hubungan dengan masyarakat sekitar perusahaan. Pencatatan bentuk kreativitas sekunder yaitu dalam bentuk kreativitas sosial dan lingkungan, seperti hasil dari pengolahan limbah, berupa lingkungan bersih (Mulawarman, 2011).

Makna atau pengertian akuntabilitas dapat dilihat dari aspek manajemen pemerintah yaitu menurut Ulum (2009:29) dalam tim studi Akuntabilitas Keuangan Kinerja Instansi Pemerintah-BPKP (2004:40) akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan atas pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban secara periodik.

Dari penjelasan tersebut disimpulkan bahwa akuntabilitas bertujuan untuk memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat atas dana yang digunakan pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya pemerintah dalam peningkatan pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Akuntabilitas adalah suatu pertanggungjawaban oleh pihak-pihak yang diberi kepercayaan oleh masyarakat/individu dimana nantinya terdapat keberhasilan atau kegagalan di dalam pelaksanaan tugasnya tersebut dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Pertanggungjawaban tersebut berkaitan langsung dengan aktivitas birokrasi dalam memberikan pelayanan sebagai kontra prestasi atas hak-hak yang telah dipungut langsung maupun tidak langsung dari masyarakat.

Akuntabilitas Islam memiliki tujuan yang lebih luas yaitu tujuan ekonomi, politik, keagamaan dan sosial. Artinya akuntabilitas menurut hukum ilahi Islam adalah cara untuk sumber kehidupan yang dalam pengertian teknis merujuk kepada sistem hukum sesuai Al-Quran dan hadits. Akuntabilitas Islam bukan hanya duniawi dan yang berorientasi uang, tapi berusaha untuk mencari keberkahan Allah SWT (Prasetio : 2017).

Pertanggungjawaban perlu dilakukan melalui media yang selanjutnya dapat dikomunikasikan kepada pihak internal maupun pihak eksternal (publik) secara periodik maupun secara tak terduga sebagai suatu kewajiban hukum dan bukan karena sukarela. Ulum (2009:40) mengemukakan dua jenis akuntabilitas yaitu :

1. Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai :

- a. Integritas keuangan
- b. Pengungkapan
- c. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan yang disajikan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah. Dengan dilaksanakannya ketiga komponen tersebut akan dihasilkan suatu informasi yang dapat diandalkan dalam pengambilan keputusan, informasi tersebut akan tercermin dalam laporan keuangan yang merupakan media pertanggungjawaban. Integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan menjadi indikator dan akuntabilitas keuangan.

a) Integritas keuangan

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, integritas adalah kejujuran, keterpaduan, kebulatan, keutuhan. Dengan kata lain integritas keuangan mencerminkan kejujuran penyajian. Kejujuran penyajian adalah bahwa harus ada hubungan atau kecocokan antara angka dan deskripsi akuntansi dan sumber-sumbernya. Integritas keuangan pun harus dapat menyajikan informasi secara terbuka mengenai laporan keuangan daerah. Agar laporan keuangan dapat diandalkan informasi yang terkandung didalamnya harus menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan. Penyajian secara wajar yang dimaksud terdapat dalam

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005, menyatakan : “Laporan keuangan menyajikan dengan wajar laporan realisasi anggaran, neraca dan laporan arus kas.”

Faktor pertimbangan sehat bagi penyusunan laporan keuangan diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian tersebut diakui dengan pengungkapan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya, pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlalu tinggi sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal.

b) Pengungkapan

Konsep *full disclosure* (pengungkapan lengkap) mewajibkan agar laporan keuangan didesai dan disajikan sebagai kumpulan potret dari kejadian ekonomi yang mempengaruhi instansi pemerintah untuk suatu periode dan berisi cukup informasi. Yang menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan sehingga membuat pemakai pengguna laporan keuangan paham dan tidak salah tafsir terhadap laporan keuangan tersebut.

Pengungkapan lengkap merupakan bagian dari prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan, sehingga terdapat di dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan.

c) Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan

Akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah harus menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, antara lain :

- 1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia khususnya yang mengatur mengenai keuangan Negara,
- 2) Undang-undang Perbendaharaan Indonesia,
- 3) Undang-undang APBN,
- 4) Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintah daerah,
- 5) Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah
- 6) Ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan APBN/APBD,
- 7) Peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang keuangan pusat dan daerah.

Apabila terdapat pertentangan antara standar akuntansi keuangan pemerintah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,

maka yang berlaku adalah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

2. Akuntabilitas kinerja

PP 105 tahun 2000 dan PP 108 tahun 2000 telah menyatakan mengenai penyusunan APBD berdasarkan kinerja dan pertanggungjawaban APBD untuk penilaian kinerja berdasarkan tolak ukur renstra. Demikian pula Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, yang mencerminkan adanya kemauan politik pemerintah untuk segera memperbaiki infrastruktur sehingga dapat diciptakan pemerintah yang baik.

Tujuan peraturan perundang tentang akuntabilitas kinerja dalam untuk memperbaiki *sense of accountability* di jajaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran sesuatu yang berkaitan dengan tanggungjawab atas pemberian amanah kepada seseorang pejabat publik berikut berbagai sumber daya yang digunakan untuk mencapai misinya. Menurut Mardiasmo (2004:21) akuntansi publik terdiri atas dua macam, yaitu akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*) dan akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*).

Akuntabilitas Vertikal (*vertical accountability*) adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada

pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR. Sedangkan akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*) adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

Dalam konteks organisasi pemerintah, akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan *disclosure* atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus bisa menjadi subjek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik.

G. Prinsip-Prinsip Akuntabilitas

Dalam pelaksanaan akuntabilitas dalam lingkungan pemerintah, perlu memperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas (LAN dan BPKP) yaitu sebagai berikut :

1. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staff instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.
2. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
4. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh.

5. Harus jujur, objektif, transparan, dan inovatif sebagai perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

H. Tipe Akuntabilitas

Menurut Ulum (2004:42) akuntabilitas dibedakan dalam beberapa macam tipe, diantaranya dapat dikategorikan menjadi dua yaitu akuntabilitas internal dan eksternal.

1. Akuntabilitas Internal

Berlaku bagi setiap tingkatan dalam organisasi internal penyelenggaraan negara termasuk pemerintah, dimana setiap pejabat/petugas publik baik individu/kelompok berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada atasan mengenai perkembangan kinerja/hasil pelaksanaan kegiatannya secara periodik maupun sewaktu-waktu bila dianggap perlu. Keharusan akuntabilitas internal pemerintah tersebut, telah diamanatkan dalam intruksi Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

2. Akuntabilitas Eksternal

Akuntansi eksternal melekat pada setiap lembaga negara sebagai suatu organisasi untuk mempertanggungjawabkan semua amanat yang telah diterima dan dilaksanakan ataupun perkembangan untuk dikomunikasikan kepada pihak eksternal dan lingkungannya.

Akuntansi publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik terdiri atas beberapa dimensi. Menurut Hapwood, Tomkins dan Elwood yang diterjemahkan oleh Mahmudi (2005:10) dimensi

akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh lembaga-lembaga publik tersebut antara lain akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan dan akuntabilitas finansial.

Terciptanya suatu akuntabilitas sangat tergantung pada adanya hubungan komunikasi antara atasan dengan bawahan. Akuntabilitas publik juga terkait dengan kewajiban untuk menjelaskan dan menjawab pertanyaan mengenai apa yang telah, sedang, dan direncanakan akan dilakukan organisasi sektor publik karena kinerja sektor publik bersifat multidimensional, sehingga tidak ada indikator tunggal yang dapat digunakan untuk menunjukkan kinerja secara komprehensif.

a) Akuntabilitas Hukum Dan Kejujuran

Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.

b) Akuntabilitas Manajerial

Akuntabilitas manajerial terkait apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi.

c) Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.

d) Akuntabilitas Kebijakan

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

e) Akuntabilitas Finansial

Akuntabilitas finansial adalah pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik, untuk menggunakan uang publik (*publik money*) secara ekonomi, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana serta korupsi. Akuntabilitas finansial mengharuskan lembaga-lembaga publik untuk membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja finansial organisasi kepada pihak luar. Kekuatan utama akuntansi adalah pada pemberian informasi. Informasi merupakan bahan dasar untuk proses pengambilan keputusan untuk menghasilkan produk berupa keputusan untuk menghasilkan produk berupa keputusan. Dalam konteks organisasi sektor publik, keputusan yang diambil harus memenuhi prinsip akuntabilitas publik terutama terkait dengan akuntabilitas. Oleh karena itu, kualitas informasi berupa keakuratan, transparansi, ketepatan waktu, validitas, relevansi dan keandalan informasi akan sangat mempengaruhi kualitas keputusan dan akuntabilitas publik.

Salah satu akuntabilitas finansial dapat dilihat dalam laporan keuangan. Laporan keuangan adalah suatu laporan yang berisikan informasi seputar keuangan dari sebuah organisasi. Laporan keuangan di buat atau diterbitkan oleh perusahaan dari hasil proses

akuntansi agar bisa menginformasikan keuangan dengan pihak dalam maupun pihak luar yang terkait.

Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi :

- 1) Neraca
- 2) Laporan laba rugi komprehensif
- 3) Laporan perubahan ekuitas
- 4) Laporan perubahan posisi keuangan yang dapat disajikan berupa laporan arus kas atau laporan arus dana.
- 5) Catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan

Unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah aset, kewajiban dan ekuitas. Sedangkan unsur yang berkaitan dengan pengukuran kinerja dalam dalam laporan laba rugi adalah penghasilan dan beban. Laporan posisi keuangan biasanya mencerminkan berbagai unsur laporan laba rugi dan perubahan dalam berbagai unsur neraca.

Menurut APB Statement nomor 4 yang berjudul *Basic Concepts and Accounting Principles Underlying Financial Statements Business Enterprises*, secara keseluruhan tujuan laporan keuangan konvensional lebih ditekankan pada pertanggungjawaban secara horisontal, padahal pertanggungjawaban yang sebenarnya tidak

sesederhana itu. Standar akuntansi keuangan syariah di Indonesia masih mengadopsi prinsip akuntansi konvensional, menurut beberapa pakar akuntansi penggunaan prinsip akrual basis yang dipakai pada standar akuntansi keuangan masih bertentangan dengan prinsip syariah. Beberapa ahli yang memilih akuntansi syariah menyatakan bahwa sesuatu yang terjadi besok pada basis akrual adalah ghaib sehingga tidak semestinya mengakui suatu hal yang belum nyata. Alasan kedua adalah kesulitan dalam menghitung zakat karena zakat dibagi berdasarkan kekayaan bersih yang telah diterima, sementara pada basis akrual laporan pendapatannya tidak nyata.

Pelaporan keuangan meliputi segala aspek yang berkaitan dengan penyampaian dan penyediaan informasi keuangan. Aspek-aspek tersebut antara lain lembaga yang terlibat (misalnya penyusunan standar, badan pengawas dari pemerintah atau pasar modal, organisasi profesi dan entitas pelapor). Adapun tujuan dari laporan keuangan adalah

- 1) Memberikan informasi yang menyangkut keuangan, kinerja dan posisi keuangan.
- 2) Disusun sebagai kebutuhan bersama pemakainya.
- 3) Sebagai laporan pertanggungjawaban atas sumber daya yang diberikan oleh suatu perusahaan terhadap perusahaan yang sedang dikelola.

I. Tinjauan Empiris

Beberapa peneliti terdahulu yang meneliti mengenai prinsip-prinsip akuntansi syariah dapat dijelaskan diantaranya adalah Hidayat (2004), Nur (2015), Indrarini (2017), Syafrida (2017), dan Wardani (2012).

Hidayat (2004) melakukan penelitian yang berjudul Prinsip-Prinsip Akuntansi Syariah: Suatu Alternatif Menjaga Akuntabilitas Laporan Keuangan. Hasil penelitian menunjukkan apakah prinsip syariah dapat digunakan sebagai alternatif untuk menjaga akuntabilitas laporan keuangan, sementara penelitian ini lebih dipersempit pada perbandingan akuntabilitas laporan laba rugi akuntansi konvensional dengan *Value Added Statement* (VAS). Laporan keuangan konvensional dan syariah mempunyai kesamaan dalam beberapa hal kecuali pada laporan laba rugi. Laporan laba rugi akuntansi syariah disebut dengan *Value Added Statement* (VAS) yang lebih mengedepankan dan melaporkan banyak aspek.

Nur (2015) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Akuntansi Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan dengan Akuntabilitas Publik dan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Moderating Pada Pemerintah Kabupaten Maros. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Variabel akuntabilitas publik merupakan variabel moderating. Terlihat dari nilai signifikansi interaksi Akuntabilitas Publik (X1.X2) sebesar 0,020 lebih kecil dari standard signifikansi untuk variabel moderasi atau $p < 0,05$. Prinsip-Prinsip Akuntansi dengan Akuntabilitas Publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan. Hal ini terlihat dari nilai koefisien selisih mutlak sebesar 0,076 bernilai positif dan dengan tingkat signifikansi 0,020 menunjukkan

hubungan yang signifikan. Koefisien variabel moderating ($X1.X2$) sebesar 0,076, hal ini mengindikasikan bahwa setiap peningkatan prinsip-prinsip akuntansi dengan akuntabilitas publik akan mengakibatkan peningkatan kualitas informasi laporan keuangan. Koefisien determinasi R^2 (R square) $\times 100\% = 0,478 \times 100\% = 47,8\%$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kualitas informasi laporan keuangan dapat dijelaskan oleh prinsip-prinsip akuntansi dengan akuntabilitas publik sehingga pengaruhnya meningkat dari 10,8% menjadi 47,8% atau meningkat sebesar 37%.

Indrarini (2017) melakukan penelitian dengan judul *Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat : Perspektif Muzaki Upz BNI Syariah*. Hasil penelitiannya adalah Muzaki UPZ BNI Syariah menilai bahwa UPZ BNI Syariah belum akuntabel dan transparan dalam pengelolaan dana zakatnya. Ketidak transparan dan akuntabel UPZ tercemrin dari tidak adanya publikasi laporan keuangan baik melalui media cetak (majalah/brosur) dan web, tidak adanya pelaporan kegiatan yang dilakukan oleh UPZ dan tidak adanya laporan mustahiq yang menerima zakat.

Syafrida et al., (2017) melakukan penelitian dengan judul *Pemanfaatan Dana Sukuk Pada Dua Bank Syariah di Indonesia dan Pengaruhnya Terhadap Pembiayaan*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bank syariah menerbitkan sukuk untuk meningkatkan permodalan dan ekspansi pembiayaan serta melakukan *market profiling*. Selain itu didapatkan pula bahwa secara umum rata-rata pembiayaan Bank syariah setelah penerbitan sukuk lebih besar dibandingkan rata-rata pembiayaan sebelum penerbitan sukuk. Bank syariah dalam meningkatkan permodalan

dapat menerbitkan sukuk mudharabah subordinasi dan bila ingin melakukan ekspansi pembiayaan dapat menerbitkan sukuk mudharabah.

Wardani (2012) melakukan penelitian dengan judul Analisa Perbandingan Akuntabilitas Antara Laporan Laba Rugi Berbasis Akuntansi Konvensional dengan *Value Added Statement* (VAS) Berbasis Akuntansi Syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntansi syariah lebih membawa manfaat positif bagi semua pihak dibandingkan dengan akuntansi konvensional yang berfokus pada kepentingan satu pihak. Laporan laba rugi berbasis akuntansi konvensional dari segi akuntabilitas dinilai masih kurang dibandingkan dengan *Value Added Statement* (VAS). Penyusunan *Value Added Statement* (VAS) berdimensi amanah dengan prinsip keadilan demi tercapainya masyarakat yang sejahtera. Perbedaan antara keduanya bisa dilihat, misalnya saja dari diwajibkannya zakat dalam prinsip syariah dan diterapkannya prinsip bagi hasil yang menguntungkan kedua pihak.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dilihat dalam bentuk tabel 2.3

TABEL 2.3 Tinjauan Empiris

1	Hidayat (2005)	Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan metode penelitian deskriptif.	Apakah prinsip syariah dapat digunakan sebagai alternatif untuk menjaga akuntabilitas laporan keuangan, sementara penelitian ini lebih dipersempit pada perbandingan akuntabilitas laporan laba rugi akuntansi konvensional dengan <i>Value Added Statement</i> (VAS).
2	Nur (2015)	Penelitian ini bersifat kuantitatif, metode yang digunakan adalah analisis regresi sederhana.	Variabel akuntabilitas publik merupakan variabel moderating. Terlihat dari nilai signifikansi interaksi Akuntabilitas Publik (X1.X2) sebesar 0,020 lebih kecil dari standard signifikansi untuk variabel moderasi atau $p < 0,05$. Prinsip-Prinsip Akuntansi dengan Akuntabilitas Publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan.
3	Indrarini (2017)	Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif.	Muzaki UPZ BNI Syariah menilai bahwa UPZ BNI Syariah belum akuntabel dan transparan dalam pengelolaan dana zakatnya. Ketidaktransparan dan akuntabel UPZ tercemin dari tidak adanya publikasi laporan keuangan baik melalui media cetak (majalah/brosur) dan web, tidak adanya pelaporan kegiatan

			yang dilakukan oleh UPZ dan tidak adanya laporan mustahiq yang menerima zakat.
4	Syafrida et al., (2017)	Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan analisis uji beda rata-rata dan secara kualitatif dengan mengumpulkan literatur	bank syariah menerbitkan sukuk untuk meningkatkan permodalan dan ekspansi pembiayaan serta melakukan <i>market profiling</i> . Selain itu didapatkan pula bahwa secara umum rata-rata pembiayaan Bank syariah setelah penerbitan sukuk lebih besar dibandingkan rata-rata pembiayaan sebelum penerbitan sukuk.
5	Wardani (2012)	Penelitian ini termasuk pada bidang penelitian komparatif yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu membandingkan antara laporan laba rugi pada akuntansi konvensional dengan <i>Value Added Statement</i> (VAS) berbasis syariah Islam yang diterapkan di Indonesia.	akuntansi syariah lebih membawa manfaat positif bagi semua pihak dibandingkan dengan akuntansi konvensional yang berfokus pada kepentingan satu pihak. Laporan laba rugi berbasis akuntansi konvensional dari segi akuntabilitas dinilai masih kurang dibandingkan dengan <i>Value Added Statement</i> (VAS). Penyusunan <i>Value Added Statement</i> (VAS) berdimensi amanah dengan prinsip keadilan demi tercapainya masyarakat yang sejahtera.

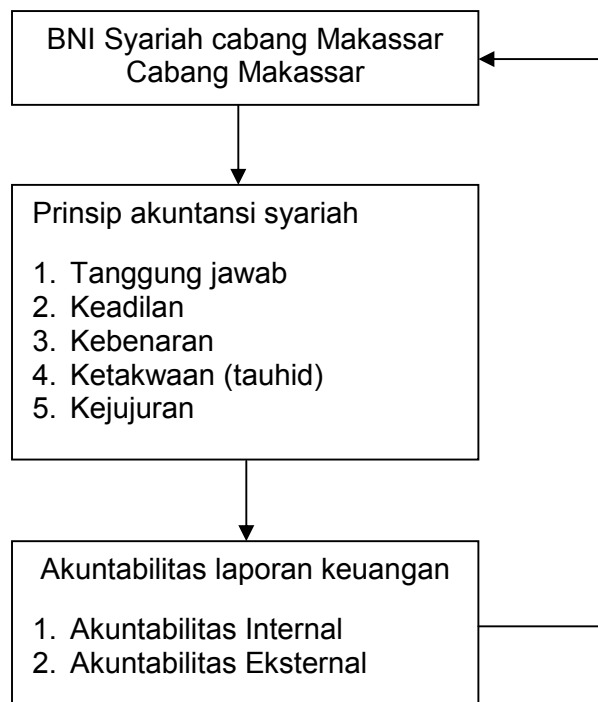
Sumber : Kompilasi

J. Kerangka Pikir

Untuk mewujudkan akuntabilitas yang baik dalam pengelolaan keuangan harus memenuhi seluruh prinsip-prinsip akuntansi syariah yang bersumber dari Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 282 dalam penerapannya terhadap suatu perusahaan maka semua karyawan akan merasa puas dengan tanggungjawab yang diberikan.

Untuk lebih jelasnya kerangka pikir dalam penulisan ini dapat digambarkan dalam kerangka pikir 2.1

Gambar 2.1 Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dengan metode analisis deskriptif, yaitu penelitian yang memaparkan apa yang terjadi dalam sebuah kancah, lapangan atau wilayah tertentu. Penelitian deskriptif ini mengetahui gambaran mengenai prinsip-prinsip akuntansi syariah dalam menjaga akuntabilitas laporan keuangan pada BNI Syariah cabang Makassar. Tujuan dari penelitian kualitatif deskriptif adalah untuk membuat gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang sedang diteliti.

B. Fokus penelitian

Penelitian ini difokuskan pada prinsip-prinsip syariah yaitu kebenaran dan ketakwaan serta kewajaran dalam menjaga akuntabilitas laporan keuangan pada BNI Syariah cabang Makassar.

C. Pemilihan Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian untuk memperoleh data adalah pada BNI Syariah cabang Makassar. Pemilihan BNI Syariah sebagai lokasi penelitian disebabkan karena BNI Syariah merupakan salah satu Bank Syariah terbesar di Indonesia dan berkembang sangat pesat. Hal ini mendorong peneliti untuk meneliti terhadap prinsip-prinsip akuntansi syariah dalam menjaga akuntabilitas laporan keuangan yang dilakukan di

BNI Syariah khususnya di BNI Syariah cabang Makassar Penelitian ini diperkirakan dalam jangka waktu dua bulan.

D. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu ataupun kelompok seperti hasil wawancara atau pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan mengumpulkan dokumen dari sumber lain sehubungan dengan penelitian ini (Sugiarto : 2001)

E. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian umumnya menggunakan teknik observasi partisipasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data terhadap beberapa informan yang bekerja di BNI Syariah Cabang Makassar, menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen atau alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengajukan beberapa pertanyaan yaitu secara terstruktur atau tidak terstruktur, alat tulis seperti buku catatan dan pulpen, serta alat perekam kepada informan yang berkaitan dengan judul yang diteliti. Penelitian ini mengajukan pertanyaan tidak terstruktur.

G. Teknik Analisis

Untuk analisis data, peneliti akan melakukan analisis data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data, seperti wawancara, dokumentasi, serta sumber data yang telah ada untuk dapat disimpulkan. Menurut Sugiyono (2008) aktivitas dalam analisis data kualitatif harus dilakukan secara terus menerus sampai tuntas, sampai datanya jenuh. Analisis data dalam penelitian ini dilaksanakan pada saat pengumpulan data dalam periode tertentu. Untuk menyajikan data agar mudah dipahami, Miles dan Huberman (1994) menggunakan penelitian model *Analysis Interactive* yang membagi langkah-langkah dalam kegiatan analisis data dengan beberapa bagian yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut

1. Pengumpulan data

Analisis model pertama yaitu pengumpulan data hasil wawancara dan hasil observasi dari berbagai dokumen berdasarkan kategori yang sesuai dengan masalah penelitian yang kemudian dikembangkan melalui data selanjutnya.

2. Reduksi data

Reduksi data adalah membuat kategori berdasarkan macam atau jenis yang sama, membuang data yang tidak diperlukan. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data.

3. Penyajian data

Penyajian data adalah melakukan penyajian dengan memisahkan pola yang berbeda sesuai dengan jenis dan macamnya sehingga strukturnya mudah dipahami.

4. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang merupakan jawaban rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung.

BAB IV

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah BNI Syariah

Tempaan krisis moneter tahun 1997 membuktikan ketangguhan sistem perbankan syariah. Prinsip syariah dengan tiga pilarnya yaitu adil, transparan, dan maslahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang lebih adil. Dengan berlandaskan pada Undang-undang No. 10 Tahun 1998, pada tanggal 29 April 2000 didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan 5 kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin. Selanjutnya UUS BNI terus berkembang menjadi 28 Kantor Cabang dan 31 Kantor Cabang Pembantu. Disamping itu nasabah juga dapat menikmati layanan syariah di Kantor Cabang BNI Konvensional (*Office Channeling*) dengan lebih kurang 1500 outlet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Di dalam pelaksanaan operasional perbankan, BNI Syariah tetap memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah. Dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang saat ini diketuai oleh KH. Ma'ruf Amin, semua produk BNI Syariah telah melalui pengujian dari DPS sehingga telah memenuhi aturan syariah.

Corporate Plan UUS BNI tahun 2003 ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan akan dilakukan *spin off* tahun 2009. Rencana tersebut terlaksana pada tanggal 19 Juni 2010 dengan beroperasinya BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS). Realisasi waktu *spin off* bulan Juni 2010 tidak terlepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya UU No. 19 tahun 2008 tentang

perbankan syariah. Disamping itu, komitmen Pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan syariah semakin meningkat.

Pada tahun 2003 dilakukan penyusunan *Corporate Plan* yang didalamnya termasuk rencana independensi. Pada tahun 2003 dilakukan penyusunan *Corporate Plan* yang didalamnya termasuk rencana independensi pada Tahun 2009-2010. Proses independensi BNI syariah diperkuat dengan kebijakan otonomi khusus yang diberikan oleh BNI kepada UUS BNI pada tahun 2005. Pada Tahun 2009, BNI membentuk tim Implementasi pembentukan Bank Umum Syariah, sehingga terbentuk PT Bank BNI syariah yang efektif beroperasi sejak tanggal 19 Juni 2010. Sejak terbentuknya dari tanggal 19 Juni hingga september 2013 jumlah cabang BNI Syariah mencapai 64 kantor cabang, 161 kantor cabang pembantu, 17 kantor kas, 22 mobil layanan gerak dan 16 *Paymen Point*.

Bank BNI Syariah Cabang Makassar terletak di Jl. Pajonga Dg. Ngalle No. 32 Pa'batong, Mamajang, Kota Makassar.

Pembukaan cabang syariah tersebut didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

1. Menyediakan layanan perbankan yang lengkap (mewujudkan Bank BNI sebagai *Universal Banking*)
2. 30 % masyarakat Indonesia menolak sistem bunga (Data MUI)
3. Landasan operasional perbankan Syariah
4. Masih terbatasnya *kompetitor*
5. Respons dan kepercayaan masyarakat yang besar atas kehadiran Bank Syariah.

B. Visi dan Misi BNI Syariah

1. Visi BNI Syariah yaitu “Menjadi bank syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja
2. Misi BNI Syariah yaitu :
 - a. Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan.
 - b. Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah.
 - c. Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor.
 - d. Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah.
 - e. Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah.

C. Tata Nilai dan Budaya Kerja BNI Syariah

Dalam menjalankan kewajibannya yang berpedoman pada dasar hukum Syariah yaitu Al-Quran dan Hadits, seluruh insan BNI Syariah juga memiliki tata nilai yang menjadi panduan dalam setiap perilakunya. Tata nilai ini dirumuskan dalam budaya kerja BNI Syariah yaitu Amanah dan Jamaah. Amanah adalah salah satu sifat wajib Rasulullah SAW yang secara harfiah berarti “dapat dipercaya”. Dalam budaya kerja BNI Syariah, amanah didefinisikan sebagai “Menjalankan tugas dan kewajiban dengan penuh tanggung jawab untuk memperoleh hasil yang optimal”. Nilai Amanah ini tercermin dalam perilaku utama insan BNI Syariah:

1. Profesional dalam menjalankan tugas
2. Memegang teguh komitmen dan bertanggung jawab

3. Jujur, adil, dan dapat dipercaya
4. Menjadi teladan yang baik bagi lingkungan

Jamaah adalah perilaku kebersamaan umat Islam dalam menjalankan segala sesuatu yang sifatnya ibadah dengan mengutamakan kebersamaan dalam satu naungan kepemimpinan. Dalam budaya kerja BNI Syariah, Jamaah didefinisikan sebagai “Bersinergi dalam menjalankan tugas dan kewajiban”. Budaya ini dijabarkan dalam perilaku utama:

1. Bersinergi dalam menjalankan tugas dan tanggung kewajiban.
2. Bekerja secara rasional dan sistematis.
3. Saling mengingatkan dengan santun.
4. Bekerjasama dalam kepemimpinan yang efektif.

D. Susunan Organisasi BNI Syariah

1. Dewan Komisaris
 - a. Komisaris Utama : Fero Poerbonegoro
 - b. Komisaris Independen : Rizqullah
 - c. Komisaris Independen : Max R. Niode
2. Dewan Direksi
 - a. Direktur Utama : Abdullah Firman Wibowo
 - b. Direktur Bisnis : Dhias Widhiyati
 - c. Direktur Kepatuhan dan Risiko : Tribuana Tunggadewi
 - d. Direktur : Iwan Abdi
 - e. Direktur : Wahyu Avianto

3. Komite di Bawah Komisaris

- a. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi : Andrianto Daru
Kurniawan
- b. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi : Idayu Nilawati
- c. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi : Arief Adhi Sanjaya
- d. Anggota Komite Audit : Vivin Haryadi
- e. Anggota Komite Audit : Alexander Zulkarnain
- f. Anggota Komite Pemantau Risiko : Delyuzar Syamsi
- g. Anggota Komite Pemantau Risiko : Subardiah
- h. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi : Munifah Syanwani

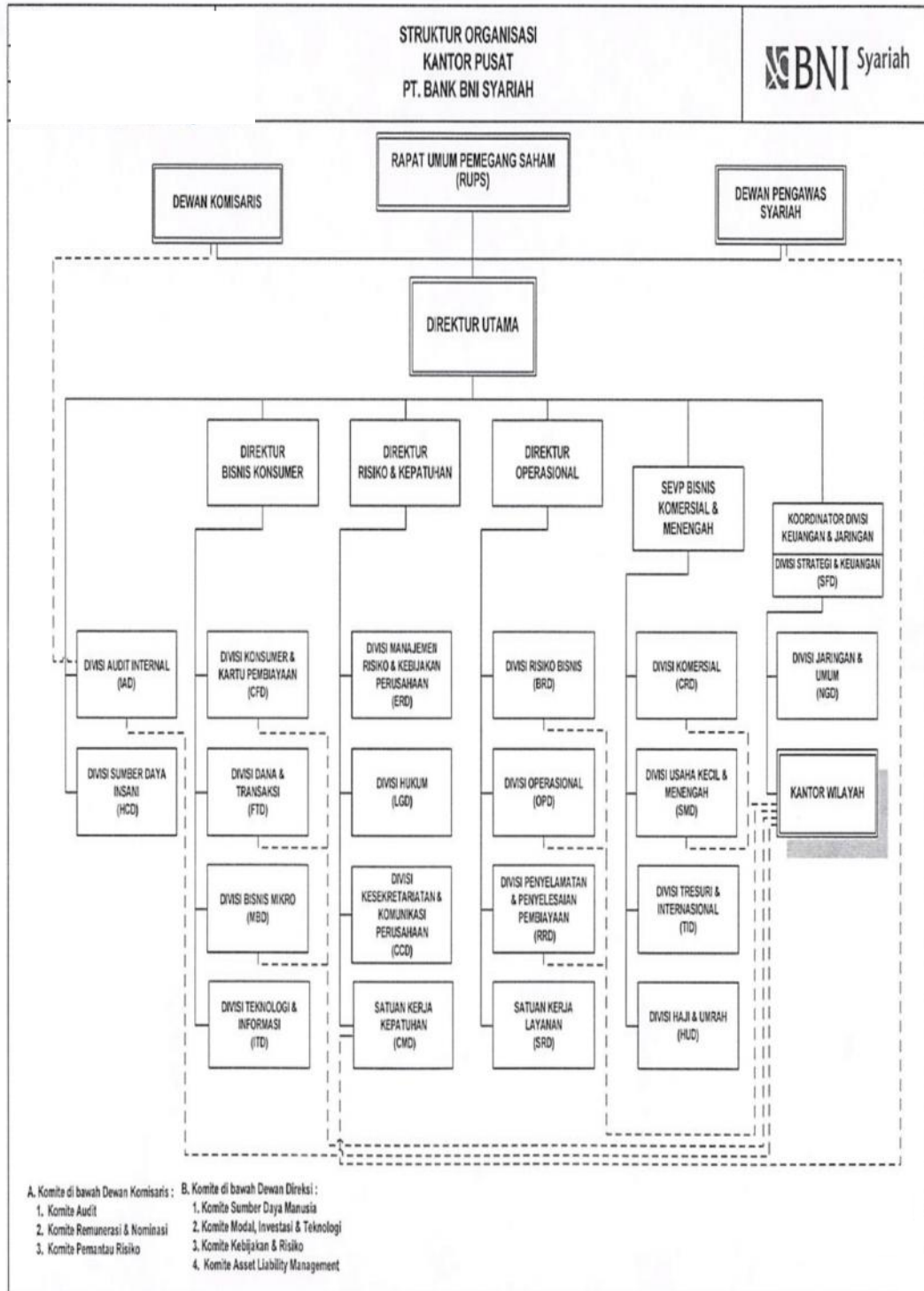
4. Dewan Pengawas Syariah

- a. Ketua : KH. Ma'ruf Amin
- b. Anggota : Hasanuddin

E. Struktur Organisasi BNI Syariah

Struktur organisasi yang baik berusaha mewujudkan keserasian dan keharmonisan kerja. Struktur organisasi merupakan sistem yang harus dilaksanakan oleh manajer untuk menggerakkan aktivitas untuk mewujudkan kesatuan tujuan. Struktur organisasi harus selalu dievaluasi untuk memastikan konsistensinya dalam pelaksanaan operasi yang efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan sekarang. Struktur organisasi merupakan suatu cara pembagian tugas pekerjaan yang kemudian dikelompokkan serta dikoordinasikan secara formal (Nurhayati dan Darwansyah : 2013).

Gambar 4.1 Struktur Organisasi



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Keterbukaan Laporan Keuangan pada BNI Syariah Cabang Makassar

Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut (SAK, 2009). Laporan keuangan syariah dan konvensional memiliki perbedaan terutama pada laporan laba ruginya. Sama halnya dengan laporan keuangan, PSAK Syariah dan konvensional juga memiliki perbedaan. Untuk PSAK Syairah 59 lebih rincinya ada pada PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah yang menyajikan laporan keuangan bertujuan umum untuk entitas syariah.

Keterbukaan merupakan keharusan dan kebutuhan bagi perbankan syariah guna menyampaikan informasi yang benar, akurat, tepat waktu, dan mudah diakses oleh pemegang saham dan masyarakat. Keterbukaan pada syariah sama halnya dengan bank-bank pada umumnya. Pelaporan publisitasnya melalui media baik media cetak maupun media online, riciannya bisa dilihat dan diketahui dengan jelas.

Laporan keuangan yang disajikan oleh BNI Syariah cabang Makassar sudah sesuai dengan PSAK syariah 59 yang diuraikan lebih detail dalam PSAK 101 yang laporan keuangannya disajikan dengan tujuan umum untuk entitas syariah.

2. Prinsip Yang Dianut dalam Penyusunan Laporan Keuangan pada BNI Syariah Cabang Makassar

Prinsip Akuntansi Syari'ah adalah aturan keputusan umum yang diturunkan dari tujuan laporan keuangan dan konsep akuntansi syari'ah yang mengatur pengembangan teknik akuntansi syari'ah. Prinsip-prinsip syari'ah bersumber dari Al-Qur'an, Hadits, dan Fiqh, sumber-sumber tersebut digunakan secara runut (hirarkis) tidak boleh mendahului satu terhadap lainnya, hal ini dimaksudkan agar kehadiran Tuhan dalam setiap sisi kehidupan manusia adalah suatu prioritas. Ada 5 prinsip akuntansi syariah yaitu prinsip tanggung jawab, prinsip keadilan, prinsip kebenaran, prinsip ketakwaan, dan prinsip kejujuran. Berikut penjelasan mengenai 5 prinsip-prinsip syariah tersebut dalam BNI syariah cabang Makassar.

a. Prinsip Tanggung Jawab

Pertanggung-jawaban tertinggi adalah kepada Allah, berlaku amanah. Mengakui kerja adalah ibadah yang selalu dikaitkan dengan norma dan nilai "syariah". Merealisasikan fungsi manusia sebagai khalifah di muka bumi dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Dalam kebudayaan kita, umumnya "tanggung jawab" diartikan sebagai keharusan untuk "menanggung" dan "menjawab" dalam pengertian lain yaitu suatu keharusan untuk menanggung akibat yang ditimbulkan oleh perilaku seseorang dalam rangka menjawab suatu persoalan. Dimana implikasinya dalam bisnis dan akuntansi adalah bahwa individu yang terlibat dalam praktik bisnis harus selalu melakukan pertanggungjawaban apa yang telah diamanatkan dan

diperbuat kepada pihak-pihak yang terkait. Dalam BNI syariah pertanggungjawabannya diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan dengan menyampaikan informasi yang benar, akurat, tepat waktu dan mudah diakses oleh pemegang saham dan masyarakat. Dalam akuntansi tujuan pencatatan adalah: pertanggungjawaban atau sebagai bukti transaksi, penentuan pendapatan dan informasi yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan dan lain-lain. (Susilowati : 2017).

b. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan ini tidak saja merupakan nilai yang sangat penting dalam etika kehidupan sosial dan bisnis, tetapi juga merupakan nilai yang secara inheren melekat dalam fitrah manusia. Dalam konteks akuntansi keadilan mengandung pengertian yang bersifat fundamental dan tetap berpijak pada nilai-nilai etika/syariah dan moral, secara sederhana adil dalam akuntansi adalah pencatatan dengan benar setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan (Susilowati : 2017). Dalam BNI syariah prinsip keadilan tidak dapat dipisahkan dengan prinsip kebenaran. Nilai-nilai keadilan, kebenaran dan kejujuran harus diaktualisasikan dalam praktik akuntansinya.

c. Prinsip Kebenaran

Berdasarkan uraian tentang keterbukaan laporan keuangan disimpulkan bahwa kebenaran yang terkandung adalah kebenaran yang ditentukan oleh ikhtiar manusia yang sifatnya bisa terjadi bila ada yang menguatkannya dan sebaliknya jika tidak ada maka hal tersebut tidak benar. Sesuai dengan prinsip akuntansi yang

mengharuskan adanya dokumen sebagai bukti transaksi. Dalam BNI Syariah laporan keuangan yang di akui dengan menganut prinsip kebenaran sebelum di publish harus diaudit terlebih dahulu oleh auditor independen. Setelah laporan keuangan di audit barulah di publish.

Berdasarkan hasil wawancara oleh Zulfan Lukman yang merupakan operasional manager pada BNI Syariah cabang Makassar yang menyatakan bahwa :

“Misalnya seperti ini jadi syariah secara laporan keuangan ternyata laba yang disampaikan 500 Milyar itu berdasarkan internal kami tapi untuk di publish belum tentu, harus ada audit eksternal yang mengaudit, dan ternyata labanya BNI Syariah bukan 500 Milyar tapi cuma 400 Milyar dikarenakan salah memposting. Itulah data kebenaran setelahnya kemudian di publish dan dilaporkan ke pemegang saham dan masyarakat.”

Hasil wawancara ini menyatakan laporan keuangan BNI Syariah menerapkan prinsip kebenaran karena laporan keuangannya di audit terlebih dahulu oleh auditor eksternal untuk menghindari kesalahan yang dilakukan oleh auditor internal sebelum di publish dan dilaporkan kepada pemegang saham dan masyarakat.

d. Prinsip ketakwaan

Bapak Zulman Lukman sebagai responden juga mengungkapkan bahwa :

“Takwa membicarakan tentang personal kita, makanya dalam setiap hadits kita harus sering bertakwa tidak ada hubungannya

dengan ini, menurut saya dan selama saya mempelajari perbankan syariah masalah ketakwaan tidak ada hubungannya dengan ini. Takwa membicarakan hati seseorang menjalankan sesuatu sesuai dengan Quran dan Sunnah-Nya. Jadi bicara tentang ketakwaan itu bukan bicara tentang institusi tapi pribadi seseorang kecuali kalau berdasarkan prinsip syariah. Kenapa berdasarkan prinsip syariah karena diawasi oleh dewan pengawas syariah. Tapi kalau bicara masalah ketakwaan pada benda itu susah, institusi itu bukan manusia tapi benda mati cuma orang yang menjalankannya. Kalau ditanya apakah orang-orang yang menjalankan itu sudah bertakwa, susah karena seseorang susah menilai ketakwaan orang lain, hanya Allah SWT yang bisa menilai apakah seseorang itu sudah bertakwa atau tidak. Jadi bicara ketakwaan itu untuk umum.”

Berdasarkan pernyataan beliau dapat disimpulkan bahwa takwa itu membicarakan personal dan tidak berhubungan dengan institusi. Mempelajari perbankan syariah dengan masalah ketakwaan artinya berkaitan hati seseorang dengan berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah-Nya. Hanya Allah SWT yang bisa menilai bagaimana seorang akuntan yang bertakwa melakukan pencatatan transaksi. Pelaksanaan akuntansi syariah harus menghindari adanya bunga dalam pembebanan-pembebanan dari transaksi yang dilakukan. Dengan demikian harus percaya dan yakin bahwa semua aktifitasnya diberkati dan di ridhai oleh Allah SWT.

e. Prinsip Kejujuran

Kejujuran adalah sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang, baik harta, ilmu pengetahuan, dan hal-hal yang bersifat rahasia yang wajib diperlihara atau disampaikan kepada yang berhak menerima, harus disampaikan apa adanya tidak dikurangi atau ditambah-tambahi. Kejujuran merupakan ajaran Islam yang mulia. BNI syariah menyajikan laporan keuangan yang berlandaskan pada keadilan, kejujuran, dan kebenaran sebagai bentuk pelaksanaan tanggungjawab kepada sesama manusia.

3. Kewajaran akuntabilitas laporan keuangan pada BNI Syariah cabang Makassar

Kewajaran mempunyai peranan yang penting dalam akuntansi untuk memberikan jaminan kepada pengguna bahwa akuntan dan auditor telah melakukan pekerjaan dengan benar dan bertindak adil. Pernyataan tersebut didukung oleh teori menurut Setiyanti (2012) dalam laporan audit, auditor menyatakan pendapatnya mengenai kewajaran dalam laporan keuangan yang diaudit. Pendapat dari auditor tersebut biasanya disajikan dalam laporan audit baku, yang terdiri dari tiga paragraf, yaitu paragraf pengantar (*introductory paragraph*), paragraf lingkup (*scope paragraph*), dan paragraf pendapat (*opinion paragraph*). Pada BNI Syariah cabang Makassar laporan keuangannya telah wajar karena sudah diaudit oleh auditor. Yang dapat digunakan oleh auditor sebagai kriteria untuk mengukur kewajaran penyajian laporan keuangan laporan keuangan adalah

- a. Peraturan yang ditetapkan oleh suatu badan legislatif.
- b. Anggaran atau ukuran prestasi lain yang ditetapkan oleh manajemen.
- c. Prinsip akuntansi berterima umum.

Tipe auditor yang menggunakan kriteria tersebut adalah tipe auditor independen (Suryandari E : 2016).

Kewajaran laporan keuangan terkait dengan prinsip kebenaran. Kebenaran laporan keuangan terkait dengan kewajaran karena telah diaudit oleh lembaga eksternal dari auditor eksternal. Auditor eksternal memastikan kelayakan dan kebenaran laporan keuangan dengan membandingkan kinerja keuangan di masa lalu dan saat ini. Menurut Setiyanti (2012) auditor mempunyai fungsi meningkatkan mutu penyajian laporan keuangan perusahaan kepada masyarakat, yaitu dengan cara melaksanakan audit atas kewajaran laporan keuangan ditinjau dari kesesuaian dengan prinsip akuntansi berterima umum. Selain itu, auditor juga memberikan sumbangan kepada masyarakat dalam menjadikan laporan keuangan berbagai perusahaan dapat diperbandingkan, sehingga masyarakat dapat memperbandingkan dengan baik keputusan yang akan diambil dalam menginvestasi dananya.

4. Jenis-jenis laporan keuangan yang dibuat oleh BNI Syariah

Laporan keuangan yang dibuat oleh BNI Syariah sama pada umumnya, seperti neraca, laporan laba rugi, dan sebagainya. Pernyataan tersebut didukung oleh Matnin (2016) bahwa laporan keuangan merupakan akhir dari proses akuntansi dimana dalam proses

tersebut semua transaksi yang terjadi akan dicatat, diklasifikasikan, diikhtisarkan untuk kemudian disusun menjadi laporan keuangan.

Hal tersebut juga didukung hasil penelitian oleh Fajarwati dan Sambodo (2010) yang menyatakan bahwa laporan keuangan bank syariah mengungkapkan informasi umum mengenai bank sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku umum, dengan pengungkapan tambahan yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada :

- a. Karakteristik kegiatan bank syariah dan jasa utama yang disediakan.
- b. Peranan, sifat, tugas, wewenang Dewan Pengawas Syariah dalam mengawasi kegiatan bank syariah berdasarkan ketentuan hukum dan praktik.
- c. Tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah untuk mengawasi kegiatan bank dan induk perusahaan.
- d. Tanggung jawab bank terhadap pengelola zakat

PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah memberikan penjelasan atas karakteristik umum pada laporan keuangan syariah, antara lain terkait:

- a. Penyajian secara wajar dan kepatuhan terhadap SAK;
- b. Dasar akrual;
- c. Materialitas dan penggabungan;
- d. Saling hapus;
- e. Frekuensi pelaporan;
- f. Informasi komparatif; dan
- g. Konsistensi Penyajian

Laporan keuangan entitas asuransi syariah yang lengkap terdiri dari:

- a. laporan posisi keuangan;
- b. laporan surplus defisit *underwriting* dana *tabarru'*;
- c. dikosongkan;
- d. laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain;
- e. laporan perubahan ekuitas;
- f. laporan arus kas;
- g. laporan sumber dan penyaluran dana zakat;
- h. laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan; dan
- i. catatan atas laporan keuangan.

Neraca bank memperlihatkan gambaran posisi keuangan suatu bank pada saat tertentu. Laporan laba-rugi memperlihatkan hasil kegiatan atau operasional suatu bank selama satu periode tertentu. Laporan perubahan posisi keuangan memperlihatkan darimana saja sumber dana bank dan kemana saja adana disalurkan. Laporan ini disusun dari neraca pada dua periode dan laporan laba-rugi selama periode yang dilaporkan. Selain dari ketiga komponen utama laporan keuangan diatas, juga harus disertakan catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Berbeda dengan perusahaan lainnya, bank diwajibkan untuk membuat laporan keuangan secara lengkap (Ilyas : 2016).

Dari hasil wawancara dapat dinyatakan bahwa banyak hambatan yang dihadapi oleh BNI Syariah baik dari eksternal maupun internalnya. Hambatan umumnya pada masyarakat sendiri yang belum semuanya menabung di Bank Syariah. Banyak masyarakat yang mengatakan bahwa

syariah sama saja dengan konvensional itu adalah salah satu hambatannya. Padahal penduduk di Indonesia mayoritas Muslim, secara presentasi yang menabung di bank syariah dibandingkan dengan di bank konvensional hanya 5% dan ada 90% masyarakat Indonesia adalah Muslim, yang tidak menabung itulah hambatannya. Untuk hambatan terhadap prinsip syariah, sistem, dan teknis tidak ditemukan masalah, tidak ada hambatan yang di hadapi hanya pengakuan dan penilaian masyarakat terhadap kebenarannya. Bank syariah yang beroperasi atas dasar sistem syariah, dalam operasionalnya syarat dengan pertimbangan moralitas keagamaan. Bank Syariah melarang kegiatan usaha tertentu yang bertentangan dengan kaidah- kaidah agama. Bank Syariah tidak akan memberikan kredit untuk tujuan produksi minuman keras, sarana perjudian dan proyek-proyek lain yang dapat membahayakan moralitas dan kesehatan manusia (Yunitarini : 2007).

Pernyataan tersebut didukung oleh Yunitarini (2007) bahwa bank Syariah dalam perhitungannya memiliki dua jenis perhitungan. Pertama menggunakan dasar *profit sharing*. Dalam sistem ini besar kecil pendapatan yang akan diterima nasabah tergantung pada keuntungan bank. Kedua menggunakan dasar perhitungan *revenue sharing*, besar kecil pendapatan yang akan diterima nasabah tergantung pendapatan kotor bank. Bank syariah di Indonesia umumnya menerapkan sistem *revenue sharing* yang dapat memperkecil kerugian nasabah. Dan masih banyak masyarakat yang yang menganggap sama dengan bank umum lainnya, walaupun sama-sama mencari untung karena bank syariah bukanlah

lembaga sosial. Tetapi ada akad juga yang membedakannya, haram dan halalnya sesuatu itu karena akadnya.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

Keterbukaan dalam penyajian laporan keuangan BNI Syariah cabang makassar sudah sesuai dengan PSAK 101 dan laporan keuangannya yang di publish melalui media baik media cetak maupun media online. Hal tersebut tidak sesuai dan tidak didukung oleh hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Indrarini (2017) yang menilai bahwa UPZ BNI syariah belum akuntabel dan transparan dalam pengelolaan dana zakatnya. Ketidaktransparan dan akuntabel UPZ tersermin dari tidak adanya publikasi laporan keuangan baik melalui media cetak (majalah/brosur) dan web, tidak adanya pelaporan kegiatan yang dilakukan oleh UPZ dan tidak adanya laporan mustahiq yang menerima zakat.

Berdasarkan prinsip-prinsip syariah masalah akuntansi akan berkait pula dengan prinsip-prinsip syariah pada umumnya, karena syariah mencakup seluruh aspek kehidupan umat manusia baik ekonomi, sosial, politik dan falsafah moral. Dengan demikian syariah berhubungan dengan seluruh aspek kehidupan manusia termasuk di dalam hal akuntansi yang mengemukakan beberapa syarat sebagai dasar-dasar akuntansi syariah, yaitu benar (*truth*), sah (*valid*), dan adil (*justice*) yang berarti menempatkan sesuatu sesuai dengan peruntukannya.

BNI syariah mewujudkan pertanggungjawabannya dalam bentuk laporan keuangan yang disampaikan dengan benar, akurat, tepat waktu, dan mudah diakses. Serta nilai keadilan dan kejujuran yang tidak bisa

dipisahkan dengan prinsip kebenaran dalam praktik akuntansinya. Prinsip kebenaran yang dianut oleh BNI Syariah cabang Makassar sudah sesuai dengan PSAK 101 yang mengharuskan adanya bukti transaksi. Hal ini sesuai dengan teori kebenaran menurut Suriasumantri (2009) yang menyatakan bahwa ada tiga teori kebenaran yaitu korespondensi, koherensi, dan pragmatik. Bagi penganut teori korespondensi maka suatu pernyataan adalah benar jika materi pengetahuan yang dikandung pernyataan itu berkorespondensi (berhubungan) dengan objek yang dituju oleh pernyataan tersebut (Suriasumantri : 2009). Apabila laporan keuangan mengandung kebenaran dan dihubungkan dengan teori korespondensi maka adanya kesesuaian antara angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan bukti-bukti transaksi yang mendasarinya. Pembuatan laporan keuangan tidak memiliki nilai manfaat dan sah (*utility and validity*) jika tidak sesuai dengan bukti transaksi. Teori koherensi merupakan suatu teori kebenaran pengetahuan yang memiliki kriteria kebenaran suatu hal dikatakan benar apabila sesuai atau konsisten dengan kebenaran terdahulu atau yang telah ada (Suriasumantri : 2009). Menurut teori koherensi laporan keuangan memiliki nilai kebenaran berdasarkan laporan keuangan dengan prinsip dasar tertentu yaitu standar akuntansi keuangan yang telah diakui kebenarannya baik dalam dunia akuntansi maupun semua pihak dalam dunia usaha termasuk penguasa. Menurut Suriasumantri (2009) teori pragmatik adalah teori kebenaran yang memiliki kriteria suatu pengetahuan adalah benar apabila memiliki kegunaan praktis atau manfaat dalam kehidupan. Kebenaran laporan keuangan relevan dengan yang diungkapkan dengan teori pragmatik karena laporan

keuangan yang merupakan informasi bisnis bagi para pengguna dengan tujuan untuk mengambil keputusan ekonomi karena laporan keuangan harus memberikan karakteristik pokok sehingga informasi yang dihasilkan memenuhi keandalan bagi pengambil keputusan.

Dalam BNI syariah cabang Makassar laporan keuangan yang di akui dengan prinsip kebenaran, keadilan dan kejujuran sebelum di publish harus di audit terlebih dahulu oleh auditor independen. Setelah laporan keuangan di audit barulah di publish. Auditor independen adalah seorang akuntan publik yang bersertifikat atau kantor akuntan publik yang melakukan audit atas entitas keuangan komersial maupun non komersial (Carolita dan Rahardjo : 2012). Pelaporan publisitasnya melalui media baik media cetak maupun media online yang mudah diakses oleh pemegang saham.

Ada lima jenis opini yang diberikan oleh auditor setelah selesai melakukan pengauditan atas laporan keuangan perusahaan klien. Kelima jenis opini tersebut adalah :

- a. *Unqualified Opinion* (Pendapat wajar tanpa pengecualian)
- b. *Unqualified Opinion With Explanatory Language* (Pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelas)
- c. *Qualified Opinion* (Pendapat wajar dengan pengecualian)
- d. *Adverse Opinion* (Pendapat tidak wajar)
- e. *Disclaimer of Opinion* (Tidak memberikan pendapat)

Pada BNI Syairah cabang Makassar jenis opini yang sesuai adalah *unqualified opinion* (pendapat wajar tanpa pengecualian) yaitu Opini ini diberikan oleh auditor setelah menyelesaikan proses audit sesuai dengan standar auditing, dan tidak ditemukan adanya pembatasan dalam lingkup

audit, tidak ada pengecualian yang signifikan tentang kewajaran dalam penyusunan laporan keuangan dan konsistensi penerapan prinsip akuntansi berterima umum.

Laporan audit yang berisi pendapat wajar tanpa pengecualian adalah laporan yang paling dibutuhkan oleh semua pihak, antara lain klien, pemakai informasi keuangan maupun oleh auditor . Pendapat wajar mempunyai arti bebas dari keraguan dan ketidak jujuran serta lengkapnya informasi. Pendapat ini juga tidak terbatas pada jumlah rupiah dan pengungkapan yang tercantum dalam laporan keuangan, tetapi juga berdasarkan ketepatan penggolongan informasi.

Kewajaran penyajian laporan keuangan tentang posisi keuangan dan hasil usaha suatu organisasi, dan sudah sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum, jika memenuhi kondisi sebagai berikut :

- 1) Laporan keuangan sudah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum.
- 2) Adanya penjelasan jika terjadi perubahan penerapan prinsip akuntansi berterima umum
- 3) Adanya penjelasan yang cukup mengenai informasi dalam catatan-catatan yang mendukung dalam laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum.

BNI syariah menyajikan laporan keuangan yang berlandaskan pada keadilan, kejujuran, dan kebenaran sebagai bentuk pelaksanaan tanggungjawab kepada sesama manusia dan pelaksanaan perintah (kewajiban) dari Tuhan. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Nur Hidayat (2004) yang menunjukkan bahwa akuntansi syariah yang menyajikan

laporan keuangan berlandaskan pada keadilan, kejujuran, dan kebenaran sebagai bentuk pelaksanaan tanggungjawab kepada sesama manusia dan pelaksanaan perintah (kewajiban) dari Tuhan, sehingga dapat dijadikan dasar dalam memperhitungkan kewajiban zakat secara benar dalam tinjauan syaria'ah, juga tidak menimbulkan kerugian pihak-pihak yang terkait dengan informasi laporan keuangan akuntansi syariah. Kejujuran merupakan ajaran Islam yang mulia. hadits dari Al Hasan bin 'Ali, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda. Dalam hal ini, Al Quran menyatakan dalam berbagai ayat, antara lain dalam surah Asy-Syura ayat 181-184 yang berbunyi :

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ (181) وَزِنُوا بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ (182) وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُسْتَبِدِينَ (183) وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّ الْأُولِينَ (184)

“Sempurnakanlah takaran dan janganlah kalian termasuk orang-orang yang merugikan; dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kalian merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kalian merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan; dan bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kalian dan umat-umat yang dahulu.”

Dari ayat tersebut Allah SWT memerintahkan seluruh umatnya untuk tidak berbuat curang dalam melakukan apapun. Orang-orang yang tidak bisa jujur dan hanya bisa berbuat jahat kepada orang lain tidak akan melakukan pekerjaannya dengan baik dan tidak menghasilkan apapun bahkan hanya mengakibatkan kerusakan kepada dirinya sendiri.

Prinsip ketakwaan yang di anut oleh BNI Syariah cabang Makassar hanya diterapkan pada transaksinya dan tidak bisa dihubungkan dengan institusi yaitu pelaksanaan akuntansinya menghindari adanya bunga dalam transaksinya. Ketakwaan bersifat personal dan hanya Allah SWT yang bisa menilai pribadi seseorang pada pelaksanaan akuntansinya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nur Hidayat (2004) yang menunjukkan bahwa akuntansi syariahuntutannya adalah kebenaran hakiki (*al-haq*) atau kebenaran yang harus dipertanggungjawabkan dihadapan Allah SWT, walaupun disatu sisi akuntansi syariah juga harus merujuk pada standar akuntansi tetapi standar tidak dimaksudkan sebagai pembenaran, artinya laporan yang dibuat sesuai dengan standar tidak selalu benar menurut syariah, bila secara substansi laporan menyimpang dari prinsip-prinsip syariah. Akuntansi syariah mencoba menemukan apa yang seharusnya dibuat sesuai dengan anjuran Tuhan (wahyu), dalam tataran ini akuntansi syariah tidak hanya diikat agar berada pada koridor standar akuntansi tetapi diikat pula dengan pertanggungjawaban dihadapan Tuhan (normatif religius).

Ketakwaan yaitu prinsip akuntansi syariah yang berdasarkan personal seperti pemegang kuasa dan pelaksana. Ketakwaan artinya mengakui bahwa Allah SWT adalah penguasa tertinggi, melakukan segala yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang oleh-Nya karena hanya takut kepada Allah SWT. Dalam Q. S Al Hujarat : 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا^٥

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ^٦ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”

Dari ayat tersebut Allah SWT memperingatkan bahwa banyaknya perbedaan antar umat manusia tidak menghalangi mereka untuk bertakwa kepada-Nya. Allah SWT yang Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal akan melihat seluruh umatnya di belahan negara manapun dan suku apapun siapa yang mematuhi perintahnya.

Laporan keuangan pada BNI Syariah dibuat sama pada umumnya seperti neraca, laporan laba rugi, dan sebagainya. Sedangkan kewajaran laporan keuangannya terkait dengan prinsip tanggung jawab, keadilan, kebenaran, ketakwaan dan kejujuran yaitu laporan keuangan disampaikan dengan benar, akurat, tepat waktu dan sebelum di publish harus di audit terlebih dahulu oleh auditor independen sebagai tanggung jawabnya kepada sesama manusia. Laporan keuangan harus di audit terlebih dahulu dikarenakan biasanya terjadi kesalahan penyajian laporan keuangan yang tidak sesuai dengan PSAK 101 yang bertujuan umum untuk entitas syariah. Laporan keuangan perlu disajikan secara wajar yang berlandaskan pada keadilan, kejujuran, dan sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yang berlaku untuk kepentingan semua pihak.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai prinsip-prinsip syariah dalam menjaga akuntabilitas laporan keuangan pada BNI syariah cabang Makassar dapat disimpulkan oleh peneliti bahwa laporan keuangan yang di buat oleh BNI syariah sama pada umumnya dan sesuai dengan PSAK 101 yang bertujuan untuk entitas syariah yang sudah menganut prinsip kebenaran yaitu sebelum di publish di periksa lebih dulu oleh auditor-auditor eksternal disampaikan dengan benar, akurat, tepat waktu kemudian di laporkan ke pemegang saham dan masyarakat yang juga memberikan jaminan kepada pengguna bahwa auditor telah melakukan pekerjaannya dengan benar dan bertindak adil. Hal tersebut membuktikan bahwa kewajaran laporan keuangan dan prinsip kebenaran saling terkait yang berlandaskan pada keadilan, kejujuran, dan sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yang berlaku untuk kepentingan semua pihak dan institusi syariah. Sedangkan prinsip ketakwaan hanya diterapkan pada transaksinya dan tidak bisa dihubungkan dengan institusi karena ketakwaan bersifat personal dan hanya Allah SWT yang bisa menilainya dalam melakukan pencatatan transaksi. Ketakwaan berkaitan dengan hati seseorang dan hal itu berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnahnya, dan ditafsirkan lebih lanjut dalam QS. Surah Al-Hujarat : 13 .

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka saran-saran yang bisa dikemukakan peneliti yaitu :

1. Disarankan kepada BNI syariah agar menjaga prinsip kebenaran serta kewajaran pada laporan keuangannya untuk menjaga kepercayaan pemegang saham, masyarakat dan penggunanya.
2. Hendaknya semua pihak dalam BNI Syariah bisa mengetahui prinsip-prinsip syariah dan menjalankannya agar bisa menerapkannya secara keseluruhan.
3. Disarankan untuk meningkatkan kualitas dan keistimewaannya agar masyarakat yang belum bertransaksi menggunakan bank syariah khususnya di BNI syariah akan tertarik dan bergabung di dalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

- AAOIFI. 1998. *Standar Akuntansi dan Audit untuk Lembaga Keuangan Islam*. Bank Muamalat Indonesia. Jakarta.
- Al-Quran dan Terjemahannya. Surah Al-Baqarah : 282. Departemen Agama RI.
- Al-Quran dan Terjemahannya. Surah Al-Hujurat : 13. Departemen Agama RI.
- Al-Quran dan Terjemahannya. Surah Asy-Syura : 181-184. Departemen Agama RI.
- Anonim. 2013. *Buku Saku Perbankan Syariah*. Kementrian Agama Republik Indonesia.
- Anonim. UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
- APB, *Statement No. 4 Basic Concept and Accounting Principles Underlying Financial Statements of Business Enterprise*. 1970.
- Arsal, M., Hamid, N. I. N. BT. A., Arsal, R., Basri, M. 2014. *Costumer Behavior of The Islamic Banking*. Vol. 2. No. 7.
- Ascarya. 2006. *Akad dan Produk Bank Syariah : Konsep dan Praktek di Beberapa Negara*. Bank Indonesia.
- Budiono, A. 2017. *Penerapan Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah*. Vol. 2. No. 1.
- Carolita, K dan Rahardjo, N. S. 2012. *Pengaruh Pengalaman Kerja, Independensi, Objektivitas, Integritas, Kompetensi, dan Komitmen Organisasi Hasil Audit*. Vol. 1. No. 2.
- Fajarwati, D dan Sambodo, S. D. *Pengkajian Tentang Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan pada Lembaga Keuangan Syariah*. Vol. 2.
- Ghozali, I. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan SPSS*. Badan Penerbit UNDIP. Semarang.
- Hidayat, N. 2004. *Prinsip-Prinsip Akuntansi Syari'ah: Suatu Alternatif Menjaga Akuntabilitas Laporan Keuangan*.
- Ikatan akuntansi Indonesia. 2009. *Standar Akuntansi Keuangan, PSAK No. 1 : Penyajian Laporan Keuangan*. Salemba Empat. Jakarta.
- Ilyas, R. 2016. *Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah*. Vol. 1. No. 1.
- Indrarini, R dan Nanda, A. S. 2017. *Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat : Perspektif Muzaki UPZ BNI Syariah*. Vol. 8. No. 2.
- Kusuma. 2012. *Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Transparansi Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Vol. 2. No. 2.

- LAN, BPKP. 2001. *Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah. Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)*. Lembaga Administrasi Negara. Jakarta.
- Mahmudi. 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. UPP AMP YKPN. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2005. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi Yogyakarta. Yogyakarta.
- Matnin. 2016. *Kinerja dan Kesehatan Bank Islam*. Vol. 1. No. 1.
- Muhammad. 2002. *Bank Syariah dan Teori ke Prakteknya*. Gema Insani Press Tazkia Institute. Jakarta.
- Muhammad. 2005. *Manajemen Bank Syariah*. Edisi Revisi. UPP AMP YKPN. Yogyakarta.
- Mulawarman, A. D. 2011. *Akuntansi Syariah Teori, Konsep dan Laporan keuangan*. Bani Hasyim Press. Malang.
- Nur, S. W. 2015. *Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Akuntansi Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan dengan Akuntabilitas Publik dan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Moderating Pada Pemerintah Kabupaten Maros*. Vol. 9. No. 1.
- Nurhayati, T dan Darwansyah, A. 2013. *Peran dan Struktur Organisasi dan Sistem Remunerasi dalam Meningkatkan Kinerja*. Vol. 14. No. 2.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2018. *Transformasi Perbankan Syariah*. www.risetsyariah.ojk.go.id
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah
- Pernyataan Standar Akuntansi Syariah. 2015. No. 101.
- Prasetio, J.E. 2017. *Tazkiyatun Nafs : Kajian Teoritis Akuntabilitas*. Vol. 1. No.1.
- Prayuningrum, E. J dan Hasib, F.F. 2017. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Modal Kerja Pada Perbankan Syariah*. Vol. 3. No. 3.
- Sari, N. 2014. *Akuntansi Syariah*. Vol. 4. No. 1.
- Setiyanti, S. W. 2012. *Jenis-jenis Pendapat Auditor (Opini Auditor)*. Vol. 4. No. 2.
- Sugiarto. 2001. *Teknik Sampling*. PT. Gramedia Pustaka Umum. Jakarta.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta. Bandung.
- Suriasumantri, J. S. 2009. *Filsafat Ilmu : Sebuah Pengantar Populer*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
- Suryandari. 2016. *Bahan Ajar Pemeriksaan Akuntan 1*. Universitas Muhammadiyah. Yogyakarta.

- Susila, J. 2016. *Fiduciary dalam Produk-Produk Perbankan Syariah*. Vol.1. No.2.
- Susilowati, L. 2017. *Tanggung Jawab, Keadilan dan Kebenaran Akuntansi Syariah*. Vol. 3. No. 2.
- Syafrida, I., Nugroho, H., dan Savitri, E. 2017. *Pemanfaatan Dana Sukuk pada Dua Bank Syariah di Indonesia dan Pengaruhnya Terhadap Pembiayaan*. Vol. 3. No. 2.
- Ulum, I. 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. UMM Press. Malang.
- Ulum, I. 2009. *Audit Sektor Publik Suatu Pengantar*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Wardani, Y. S. 2012. *Analisa Perbandingan Akuntabilitas Antara Laporan Laba Rugi Berbasis Akuntansi Konvensional dengan Value Added Statement (VAS) Berbasis Akuntansi Syariah*. Vol. 3. No. 2.
- Wiroso. 2005. *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*. PT Grasindo. Jakarta.
- www.bnisyariah.co.id
- Yunitarini, S. 2007. *Prospek dan Kendala Bank Syariah di Era Globalisasi*. Vol. 5. No. 2.

LAMP IRAN

HASIL WAWANCARA

Judul : Prinsip-prinsip Akuntansi Syariah dalam Menjaga Akuntabilitas Laporan Keuangan pada BNI Syariah Cabang Makassar
Peneliti : Halidayati B
Lokasi : PT. Bank BNI Syariah Cabang Makassar, Jl. Pajonga Dg. Ngalle No. 140, Mario, Mariso, Kota Makassar, Sulawesi Selatan

oleh : Bapak Zulfan Lukman (Manager Operasional)

1. Bagaimana keterbukaan laporan keuangan pada BNI Syariah?

Jawab :

Kalau syariah keterbukaannya sama halnya dengan bank-bank pada umumnya. Pelaporan publisitasnya melalui media entah media cetak maupun TV bisa juga dilihat di situsnya untuk keterbukannya, rinci-rinciannya bisa dilihat dari situ masyarakat sudah bisa menilai berapa labanya.

2. Apakah laporan keuangan yang disusun sudah menganut prinsip kebenaran?

Jawab:

Laporan keuangan yang di akui dengan menganut prinsip kebenaran sebelum di publish harus diatur oleh auditor independen. Setelah laporan keuangan di audit barulah di publish. Misalnya seperti ini jadi syariah secara laporan keuangan ternyata labanya disampaikan 500 Milyar itu berdasarkan internal kami tapi untuk di publish belum tentu harus ada audit eksternal yang mengaudit macam-macam lah audit eksternalnya dan ternyata labanya BNI Syariah bukan 500 Milyar tapi cuma 400 Milyar dikarenakan salah memposting. Itulah data kebenaran setelahnya baru di publish dan dilaporkan ke pemegang saham dan masyarakat.

3. Apakah dalam penyusunan laporan keuangan mengutamakan prinsip ketakwaan?

Jawab:

Ketakwaan membiicarakan secara personal. Takwa membicarakan tentang personal kita, makanya dalam setiap hadits kita harus sering bertakwa tidak ada hubungannya dengan ini, menurut saya dan selama saya mempelajari perbankan syariah masalah ketakwaan tidak ada hubungannya dengan ini. Takwa membicarakan hati seseorang menjalankan sesuatu sesuai dengan Quran dan Sunnah-Nya. Jadi bicara tentang ketakwaan itu bukan bicara tentang institusi tapi pribadi seseorang kecuali kalau berdasarkan prinsip syariah. Kenapa berdasarkan prinsip syariah karena diawasi oleh dewan pengawas syariah. Tapi kalau bicara masalah ketakwaan pada benda itu susah, institusi itu bukan manusia tapi benda mati cuma orang yang menjalankannya. Kalau ditanya apakah orang-orang yang menjalankan itu sudah bertakwa, susah karena seseorang susah menilai ketakwaan orang lain, hanya Allah SWT yang bisa menilai apakah seseorang itu sudah bertakwa atau tidak. Jadi bicara ketakwaan itu untuk umum.

4. Bagaimana kewajaran akuntabilitas laporan keuangan pada BNI Syariah?

Jawab:

Wajar karena sudah diaudit oleh auditor, ini terkait dengan pertanyaan tentang prinsip kebenaran. Kebenaran pasti terkait karena sudah diaudit oleh lembaga eksternal dari auditor eksternal. Sebelum di publish itu sama Bank Indonesia biasanya menunjuk siapa yang mengaudit, apakah benar yang dilaporkan itu 500 Milyar seharusnya ada koreksi. Yang telah diaudit tersebut kemudian di publish.

5. Jenis-jenis laporan keuangan apakah yang dibuat oleh BNI Syariah?

Jawab:

Laporan keuangan yang dibuat sama pada umumnya, seperti neraca, laporan laba rugi dan sebagainya.

6. Adakah hambatan Bank terhadap prinsip syariah yang dianut?

Jawab:

Ada banyak hambatan. Hambatannya bisa dari masyarakat bisa dari internal sendiri. Umumnya dari masyarakat yang belum semuanya menabung di Bank Syariah. Contoh di Unismuh sendiri pasti dosennya ada yang bilang bahwa syariah sama dengan konvensional atau kartu kreditnya masih ada yang konvensional itu adalah salah satu hambatan. Kenapa karena Indonesia itu mayoritas Muslim, secara presentasi yang menabung di Bank Syariah di bandingkan dengan Bank Konvensional hanya 5% padahal 90% masyarakat Indonesia adalah Muslim dan sisanya kemana, itu adalah salah satu hambatan besar. Untuk hambatan terhadap prinsip syariah tidak ada, kalau hambatan secara sistem dan teknis tidak ada masalah sudah benar hanya pengakuan masyarakat terhadap kebenarannya, masyarakat yang menilai. Masyarakat masih banyak yang menganggap sama, sama-sama juga cari untung, Bank Syariah bukan lembaga sosial. Yang membedakan adalah akadnya, haram halal sesuatu itu karena akadnya. Mungkin sebagian orang beranggapan bahwa yang bekerja di Bank Syariah itu mengerti syariah, tapi tidak orang yang bekerja di Bank Syariah itu macam-macam ada yang bekerja karena memang murni mau bersyariah, tuntutan pekerjaan, dan karena profesionalitasnya yang dibutuhkan tidak ada kaitannya dengan keimanan dan ketakwaan. Bank Syariah lain bisa menerima non muslim menjadi pegawai tapi tidak

ada di Bank BNI Syariah. Jadi syariahnya berjalan itu berdasarkan transaksinya saja. Bank Syariah terbesar dan menjalankan prinsip syariah terbesar di dunia adalah di Inggris. Inggris kebanyakan non muslim tapi transaksinya syariah semua, yaitu sebagian besar perusahaan dan banknya, salah satu bank terbesar juga di Inggris, bukan di Arab Saudi. Jadi persepsi masyarakat adalah hambatan terbesarnya.



Makassar, 16 Agustus 2018

Nomor : BNISy/MAS/1757

Lamp. :-

Kepada
Universitas Muhammadiyah Makassar
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Di-
Tempat

Perihal : Surat Keterangan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

"Semoga Bapak/Ibu beserta seluruh staff dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT"

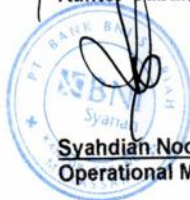
Menunjuk surat Saudara tersebut di atas perihal pada pokok surat, dengan ini kami menyatakan bahwa Saudara(i) **Halidayati B (105730512914)** telah melakukan penelitian di PT. Bank BNI Syariah Makassar dengan judul penelitian :

"Prinsip-Prinsip Akuntansi Syariah dalam Menjaga Akuntabilitas Laporan Keuangan pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Makassar"

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerjasamanya kami terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PT. Bank BNI Syariah
Kantor Cabang Makassar



Syاهدian Noor
Operational Manager



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 013/05/C.4-H/II/39/2018
Lamp. : -
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Makassar, 07 Dzulkaidah 1439 H
19 Juli 2018 M

Kepada Yth.
Pimpinan BNI Syariah Cabang Makassar

di-
Makassar

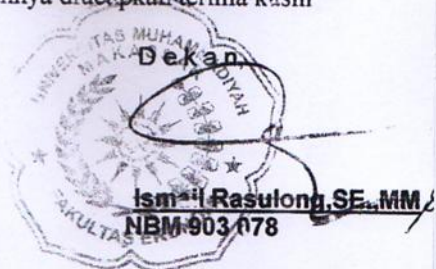
Dengan hormat,

Dalam rangka proses penelitian dan penulisan skripsi mahasiswa di bawah ini :

Nama : **Halidayati B**
Stambuk : **105730512914**
Jurusan : **Akuntansi**
Judul Penelitian : **Prinsip-Prinsip Akuntansi Syariah dalam Menjaga Akuntabilitas Laporan Keuangan pada BNI Syariah Cabang Makassar**

Dimohon kiranya mahasiswa tersebut dapat diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai tempat mahasiswa tersebut melakukan penelitian.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih



Tembusan :

1. Rektor Unismuh Makassar
2. Ketua Jurusan
3. Mahasiswa Ybs.
4. Arsip

RIWAYAT HIDUP



HALIDAYATI B, lahir pada tanggal 3 Juni 1996 di RSIA Sitti Khadijah 1 Muhammadiyah Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Penulis adalah anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Bakri dan Ibu Nasriati. Jenjang pendidikan formal yang pernah ditempuh penulis adalah Sekolah Dasar Inpres yaitu SD INP Bonto-bontoa Sungguminasa dan lulus pada tahun 2008, selanjutnya pada SMP Negeri 4 Sungguminasa dan lulus pada tahun 2011, kemudian melanjutkan di SMA Negeri 2 Makassar dan lulus pada tahun 2014. Selanjutnya melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dengan memilih program studi akuntansi pada fakultas ekonomi dan bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.